

TESIS

KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI MASA PANDEMI COVID-19
KOTA MAKASSAR



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023

**KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI MASA PANDEMI COVID-19
KOTA MAKASSAR**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister



Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

SUKMAWATI

NIM : 105031103620

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

TESIS

KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
MASA PANDEMI COVID-19 KOTA MAKASSAR

Yang diajukan dan disusun oleh

SUKMAWATI
NIM : 105031103620

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 23 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komite Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana




Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613.949

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
NBM. 107.6424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Di Masa Pandemi Covid-19 Kota Makassar
Nama : Sukmawati
NIM : 105031103620
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia penguji Tesis pada Tanggal 23 Februari 2023 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 23 Februari 2023

Tim Penguji :

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Ketua Penguji

Dr. Hj.Fatmawati, M.Si

Penguji/Pembimbing I

Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip.,M.Si

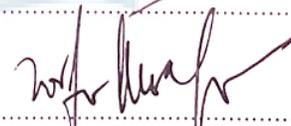
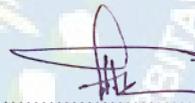
Penguji/Pembimbing II

Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

Penguji

Dr. Haerana, M.Pd

Penguji



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sukmawati
NIM : 105031103620
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagai atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Februari 2023

yang menyatakan:




TAL 20
METERAI
TEMPEL
EB#50AKX604845915
Sukmawati
105031103620

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Thesis yang berjudul "Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Masa Pandemi Covid-19 Kota Makassar ". Thesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari Thesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dosen pembimbing I Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si dan Dosen pembimbing II Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip.,M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Thesis ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda Dr Hj. Fatmawati A. Mappasere, M Si selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang senantiasa memberikan data-data yang dibutuhkan selama penelitian.

5. Masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini. mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Thesis ini.
8. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Thesis ini.
9. Saudara(i) seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan Thesis ini.

Dalam pembuatan Thesis ini walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangannya dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan penulisan ini. Semoga Thesis ini dapat bermanfaat

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kebijakan Publik.....	20
C. Kesenjangan Implementasi	35
D. Pengelolaan sampah di Masa Pandemi Covid-19.....	37
E. Kerangka Pikir	49
F. Deskripsi Fokus Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	55

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
C. Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	60
B. Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampahh di Masa Pandemi Kota Makassar	67
1. Target dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah	67
a. Tujuan Organisasi/Pencapaian Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	69
b. Eksistensi yang Terlaksana Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.....	82
2. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Pengelolaan Sampah	96
3. Solusi Mengatasi Kesenjangan Pengelolaan Sampah.....	100
C. Pembahasan.....	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	16
4.1 Berdasarkan Pangkat dan Golongan	65
4.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65
4.3 Tenaga Kotrak	65
4.4 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Makassar Tahun 2022...	81
4.5 Data Reduksi Bank Sampah Pusat.....	93
4.6 Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2021	194

DAFTAR GAMBAR

2.1 Hubungan Komponen Dalam Sistem Kebijakan Menurut Dunn.....	21
2.2 Model Edward III.....	34
2.3 Penelitian Daley, Michelle E. 2019.....	37
2.3 Kerangka Pikir.....	51
4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan Surat Penelitian	122
2. Surat Izin Penelitian (PTSP)	123
3. Surat Izin Penelitian (Walikota)	124
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	125
5. Wawancara (Instrumen Wawancara)	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sering membaca koran atau menonton TV tentang kebijakan pemerintah tanpa menyadarinya. Kita mendengar berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Widodo, 2021). Pembuatan kebijakan publik tidak diragukan lagi dilakukan dengan maksud untuk mengatasi masalah sosial, tetapi tidak setiap masalah dapat menghasilkan pembuatan kebijakan publik. (Latifah et al., 2014)

Sebagian dari kita masih merasa kritis terhadap kebijakan publik dari waktu ke waktu, memikirkan tentang bagaimana kebijakan publik bisa menjadi lebih baik (Hill & Varone, 2021). Serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud mengubah ekonomi rakyat dikenal sebagai kebijakan publik. Secara terminologi kebijakan (*policy*) menurut (Budiardjo, 2013) adalah serangkaian pilihan yang dibuat oleh partai atau aktor politik dalam upaya memilih tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Orang-orang yang membuat kebijakan ini, secara teori, harus memiliki pengaruh terhadap bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

(Abdoellah & Rusfiana, 2016) menyatakan bahwa karena kebijakan merupakan tindakan pemerintah baik dalam arti terbatas maupun umum, maka itu adalah kebijakan publik (Government Policy, Public Policy, State

Policy), dimana ini sejalan dengan pengertian PBB yang mengartikan bahwa kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak.

Salah satu tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan yaitu adalah tahap implementasi kebijakan, dimana Sekalipun sebuah kebijakan dirumuskan dengan sempurna, akan gagal jika para pelaksananya tidak melaksanakannya dengan baik. Teori siklus menegaskan bahwa tahapan proses kebijakan, yang berupa barang hukum, mencakup baik pelaksanaan kebijakan maupun tindak lanjutnya. (Wahab, 2015). Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan kerjasama timbal balik kolaborasi antara sektor publik dan komersial untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipilih pada tahap sebelumnya untuk mencapai tujuan. Akan terjadi kesenjangan implementasi jika kebijakan tidak dijalankan dengan baik, yang digambarkan sebagai “kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan”.

Kesenjangan dalam implementasi kebijakan biasanya terlihat dan dirasakan di tingkat bawah (Brailsford, 2022) Variabel politik, ekonomi, dan sosial budaya semuanya dapat berkontribusi terhadap kesenjangan implementasi kebijakan. Untuk mengcover pelaksanaan kebijakan unggulan, diperlukan strategi yang menekankan pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut memang sesuai dengan tuntutan masyarakat sasaran. (masyarakat). Untuk menutup kesenjangan implementasi kebijakan, pemerintah, sektor korporasi, dan masyarakat harus berkolaborasi.

Menurut (Edward III, 1980) Jika implementasi kebijakan publik kurang mendapat perhatian, maka tidak akan efektif, dan kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan. Empat faktor yang harus diperhatikan untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan: (1) komunikasi, yaitu pertukaran permintaan informasi kebijakan antara pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan (implementors), (2) Sumber daya, yaitu kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, termasuk tersedia atau tidaknya sumber daya pendukung. (3) disposisi, , sebagai sifat, kepribadian, nilai, dan ideologi Kemauan dan dedikasi para pelaksana kebijakan, serta ciri-ciri pelaksana kebijakan, merupakan perangkat organisasi secara menyeluruh dan terstruktur, dan (4) struktur birokrasi adalah semua alat organisasi secara menyeluruh dan terorganisir. Sistem organisasi ini memiliki dua fitur: mekanisme dan struktur birokrasi.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang terlihat memiliki kesenjangan yaitu terhadap pengelolaan sampah, dimana pengelolaan sampah tidak terlepas dari penetapan kebijakan publik pemerintah daerah yang bersangkutan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan secara tuntas. Sampah akan selalu diproduksi dan tidak akan berhenti selama manusia tetap ada, untuk itu sangatlah dibutuhkan sebuah tindakan dalam pengelolaan sampah agar sampah tidak menjadi masalah yang lebih serius dan menghancurkan sekitar.

Pengelolaan sampah diperkotaan sampai saat ini menjadi sebuah masalah lingkungan yang telah mendapat perhatian yang cukup besar dari para peneliti dan pengelola lingkungan selama beberapa decade terakhir ini. Dukungan program pengelolaan sampah memerlukan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sampah diperkotaan (Trinh et al., 2021). Dampak buruknya pengelolaan sampah karena mengerikan dan tidak proporsional pada orang miskin, yang kebanyakan ditemukan sampah di dekat rumah mereka (Kaza et al., 2018). Semua limbah padat yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia dan hewan telah dibuang karena tidak lagi dibutuhkan atau berguna dan disebut sebagai sampah. (Y. Maolani & Ishak, 2018). Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam memberikan kesadaran masyarakat adalah faktor yang paling menguntungkan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di perkotaan (Mahmud et al., 2012).

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu peningkatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha secara sistematis, menyeluruh, dan layang yang meliputi penyerapan dan penanganan sampah. (Sekarsari & Trianti, 2020). Padahal, Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, Bank Sampah merupakan tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang yang dapat bernilai ekonomi.

Apapun alasannya, dinamika kehidupan dalam memenuhi kebutuhan setiap waktu, yang terus menerus menghasilkan sampah, tidak dapat dicegah, dan proses ini akan terus berlanjut. Undang-undang pengelolaan sampah didasarkan pada asas keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan makhluk hidup, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan. (Costa, 2018). Timbulnya kerusakan lingkungan akibat tindakan masyarakat yang melawan hukum seringkali bukan karena kelalaian, melainkan ketidakpedulian mereka terhadap akibatnya. Sebagian besar sikap masyarakat ditunjukkan dengan penggunaan produk atau barang yang menghasilkan sampah di jalanan yang mayoritas adalah pengendara kendaraan bermotor. Kelas menengah ke atas yang mayoritas berpendidikan merupakan pengguna jasa jalan dari segi kelas ekonomi dan gaya hidup.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa gaya hidup penduduk di era digital akan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dinyatakan oleh UUD 1945, Demikian pula, ada undang-undang perlindungan lingkungan yang mengatur dan memastikan pengelolaan limbah yang tepat. Semua risiko diambil untuk kebaikan yang lebih besar. Sampah konon merupakan salah satu penyebab degradasi lingkungan saat ini.

Persoalan kesenjangan antar kebijakan dan praktek dalam pengelolaan sampah dapat terlihat pada kota Makassar, dimana Kota Makassar dalam hal penerapan Implementasi Kebijakan pengelolaan persampahan masih

mengalami kesenjangan implementasi, dimana Kesenjangan implementasinya terletak padanya perbedaan antara motivasi pemerintah yang dituangkan dalam hukum atau peraturan.

Seperti kota-kota di Indonesia lainnya, Kota Makassar berkembang, yang meningkatkan kebutuhan akan kebutuhan pokok, yang meningkatkan jumlah sampah. Pengelolaan sampah yang efektif tidak dapat menjelaskan peningkatan volume sampah tahunan Kota Makassar. TPA Tamangapa adalah tempat sampah Kota Makassar dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Tempat pengolahan akhir sampah, TPA Tamangapa, tetap menggunakan teknik Open Dumping. Masalah sampah Kota Makassar belum ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah, dan belum ditemukan solusi jangka panjang. (Idrus, 2019).

Menurut pasal 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, dan sampah khusus merupakan jenis sampah yang harus diolah sesuai dengan peraturan daerah setempat.

Target pembuangan sampah pada 2020 sebesar 88.494 ton per tahun, seperti diketahui. atau 245,8 ton per hari dan 7.374,5 ton per bulan. Kota Makassar memiliki kapasitas produksi sampah sebanyak 410.291 ton pada tahun 2021 atau 34.190 ton per bulan dan 1.139 ton per hari. Pada tahun 2021, target pengurangan sampah sebanyak 98.470 ton per tahun. atau 273,5 ton per hari dan 8.205 ton per bulan. Pada tahun 2020, dapat dihasilkan 402.246

ton sampah RT dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSSRT) setiap tahunnya. Sasaran pengelolaan sampah pada tahun 2020 adalah 75% per tahun atau 301.684 per tahun. Dengan demikian, target penanganan per bulan adalah 25.140,3 ton

Banyaknya sampah yang tercipta dan volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa sama-sama dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang kurang baik. Dimana penanganan sampah yang seharusnya ditargetkan sebesar 73% namun nyatanya tidak terlaksana dengan baik dan optimal atau dengan kata lain bahwa penanganan sampah di Kota Makassar tidak mencapai target yang kemudian mengakibatkan kesenjangan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar memperkirakan pada tahun 2021 jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jl Tamangapa Antang Kabupaten Manggala antara 900-1200 ton per hari, dengan timbunan sampah antara Tinggi 30 dan 40 meter. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjadi penanggung jawab juga meminta tambahan lahan seluas 2 hektare selain lokasi proyek PLTSa karena keadaan ini sudah tidak bisa dikelola lagi.

Jumlah ini cukup signifikan untuk menempatkan TPA saat ini dalam situasi kelebihan kapasitas dan menyebabkannya menjadi milik orang lain. Akibatnya, persoalan kerap berkembang, terutama saat musim kemarau, dan tumpukan sampah TPA Antang sudah lama menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Hal ini jelas mempengaruhi kesehatan penduduk sekitar. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa, Makassar pasti akan

menghasilkan sampah karena merupakan produk sampingan alami dari pertumbuhan jumlah penduduk. (<https://sulsel.suara.com/amp/read/2021/03/26/181616/tpa-antang-mengkhawatirkan-tumpukan-sampah-sudah-mencapai-40-meter>).

Selain itu, isu pengelolaan sampah berkembang selama wabah Covid-19. Ruth Stinger, pakar kebijakan sampah dari Health Care Without Harm, mengatakan ada kecenderungan peningkatan penggunaan sampah, terutama sampah non-biodegradable seperti plastik sekali pakai yang meningkat signifikan, terutama terkait dengan Covid-19. (Putra, 2020).

Diakui dengan baik bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah dinamika produksi sampah secara global, yang membutuhkan perhatian khusus (Bhakta, 2020). Sumber utama volume sampah adalah alat pelindung diri, masker bekas dan sarung tangan bekas.

Jika dikelola dengan tidak benar, penanganan limbah infeksius menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Ilyas et al., 2020). Pemerintah Kota Makassar pun di masa Pandemi Covid-19, mewajibkan semua masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah harus menggunakan masker, dimana pemakaian masker mengakibatkan bertambahnya sampah di Kota Makassar, baik secara jumlah dan juga jenis sampah. Yang tentunya akan sangat menjadi masalah besar untuk masyarakat di Kota Makassar, sehingga sangat diperlukan untuk ditindaklanjuti agar kiranya Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan baik bersama

masyarakat dalam pengelolaan sampah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Berikut tata cara pengangkutan/pengumpulan sampah yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan berlaku bagi warga Kota Makassar:

- 1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan:
 - a. Organisasi pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW bertugas mengangkut sampah rumah tangga ke TPS/TPST.
 - b. TPS/TPST ke TPA sampah merupakan kewajiban Pemerintah Kota.
 - c. Pengelola kawasan bertanggung jawab membuang sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST dan TPA di kawasan konsumen, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
 - d. Pemerintah Kota memikul sampah dan segala fasilitas umum, sosial, dan lainnya dari sumber sampah dan dari TPS/TPST ke TPA.
- 2) Pemisahan sampah ke dalam kategori yang berbeda tetap dijamin dengan pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Peralatan yang digunakan untuk mengangkut sampah harus mematuhi standar kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan yang ketat.

Untuk mengetahui masalah kesenjangan dalam pengelolaan sampah tentu sangat dibutuhkan analisis mengapa dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar mengalami kesenjangan. Michelle E. Daley (2019) mengemukakan dalam penelitiannya untuk menganalisis kesenjangan Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah dapat ditinjau dengan melihat: (1) Kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran (3) Penyebab Terjadinya Kesenjangan pengelolaan sampah, (4) Solusi mengatasi kesenjangan pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah juga harus bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi Kebijakan dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif, oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini juga sangat diperlukan sehingga pengelolaan persampahan di Kota Makassar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan target dari kebijakan publik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diutarakan sebagai berikut mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas:

1. Bagaimana kinerja Organisasi dilihat dari tujuan dan sasaran dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar jika ditinjau dari target tujuan kebijakan?
2. Apa penyebab terjadinya kesenjangan Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar?
3. Apa solusi dalam mengatasi kesenjangan yang terlihat dalam pengelolaan sampah pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menanggapi pertanyaan penelitian yang muncul, mengingat latar belakang yang disajikan dalam bab pendahuluan sebelumnya. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kinerja kinerja Organisasi dilihat dari tujuan dan sasaran dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar jika ditinjau dari target tujuan kebijakan?
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar?

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kesenjangan yang terlihat dalam pengelolaan sampah pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengenai Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik;

Mengembangkan cakupan nilai ilmu Administrasi dalam melihat sebuah kesenjangan kebijakan dan praktek di lapangan dalam pengelolaan sampah di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis;

Proposal penelitian ini akan menghasilkan gambaran bagaimana Kesenjangan Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan sampah dan Faktor-Faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan praktek dalam pengelolaan sampah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membuat perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghilangkan anggapan bahwa studi ini nyaman. Akibatnya, peneliti memasukkan temuan berikut dari studi sebelumnya dalam evaluasi literatur sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Michelle E. Daley (2019)

Penelitian (Daley, Michelle. E, 2019) berjudul "*From To Practice: A Gap Analysis Of The Provision Of Coordinated Services In Maryland*" atau "Dari Kebijakan ke Praktek: Analisis Kesenjangan Penyediaan Siswa Terkoordinasi Layanan di Maryland". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki presepsi faktor-faktor yang menghambat atau membatasi efektivitas penyediaan tim layanan siswa yang terkoordinasi dari sistem sekolah, serta untuk menyelidiki akar penyebab kesenjangan kinerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Tim layanan siswa yang terkoordinasi layanan di Maryland tidak memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung siswa yang mengalami hambatan dalam belajar, sehingga mengakibatkan kesenjangan kinerja dimana setiap siswa merasakan kinerja tim tersebut mengalami kesenjangan yang dominan dalam

hal Pengetahuan dan Keterampilan, Motivasi dan Organisasi, dan Struktur dan Praktek.

2. Hasil Penelitian Zaqu Rahman (2015)

Penelitian (Rahman, 2015) yang berjudul “Polemik Pengelolaan Sampah, Kesenjangan antara Peraturan dan Implementasi”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsep pelaksanaan pengelolaan sampah yang sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah, serta apa penyebab yang menghambat pelaksanaannya dan bagaimana mengatasi masalah pengelolaan sampah di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan sampah belum efektif dilaksanakan karena kurangnya sosialisasi tentang implementasi undang-undang tersebut, dan Beberapa ketentuan undang-undang tidak dapat segera dipraktikkan karena belum dipraktikkan. Aturan yang lebih rendah, termasuk yang diberlakukan oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah, diatur lebih lanjut. Kedua, inisiatif pengurangan sampah melalui program 3R (reuse, reduce, recycle) dinilai tidak efektif dan sulit dilaksanakan karena minimnya pengetahuan, fasilitas yang kurang memadai, dan sosialisasi yang mengakibatkan ketimpangan. Selain itu, inisiatif pengelolaan sampah tidak efektif karena tidak ada upaya untuk memisahkan sampah organik dan non-organik selama penanganan akhir.

3. Hasil Penelitian Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib (2020)

Penelitian (Nzeadibe et al., 2020) berjudul “*Solid Waste Management During Covid-19 Pandemic: Policy Gap and Prospects For Inclusive Waste Governance in Nigeria*”. Pengelolaan sampah padat selama Pandemi Covid-19: Kesenjangan kebijakan dan prospek untuk inklusif tata kelola sampah di Nigeria”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian Kualitatif, dengan mengumpulkan beberapa literatur review.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan sampah perlu dinyatakan secara tegas sebagai layanan esensial yang dikukuhkan oleh pemerintah Nigeria dengan memberikan pernyataan kekuatan hukum. Mengakui bahwa ekonomi informal adalah langkah pertama yang paling kritis untuk menuju pembingkaiian kebijakan Pengelolaan Sampah Padat (*Solid Waste Management*) di mana pemangku kepentingan utama (pekerja sampah formal dan informal) dan aktor non-negara terlibat. Tingkat keterlibatan ini akan menciptakan ruang untuk dialog yang bermakna di antara para pemangku kepentingan (termasuk pemborosan informal pekerja) tentang isu-isu kebijakan untuk mengkatalisasi pengelolaan sampah yang inklusif dan peningkatan kehidupan mata pencaharian mereka yang terlibat selama era pasca-Covid-19. Yang dimana inklusi sosial ekonomi dan spasial dari sektor sampah merupakan inti dari Tujuan Pengelolaan Sampah Global.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode yang digunakan	Hasil
1.	Michelle E. Daley (2019)	<i>"From To Practice: A Gap Analysis Of The Provision Of Coordinated Services In Maryland"</i>	Penelitian Kualitatif	Tim layanan siswa yang terkoordinasi layanan di Maryland tidak memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung siswa yang mengalami hambatan dalam belajar, sehingga mengakibatkan kesenjangan kinerja dimana setiap siswa merasakan kinerja tim tersebut mengalami kesenjangan yang dominan dalam hal Pengetahuan dan Keterampilan, Motivasi dan Organisasi, dan Struktur dan Praktek.
2.	Zaqiu Rahman (2015)	Polemik Pengelolaan Sampah, Kesenjangan antara Peraturan dan Implementasi	Penelitian Kualitatif	pengelolaan sampah belum efektif dilaksanakan karena kurangnya sosialisasi tentang implementasi undang-undang tersebut, Selain itu, beberapa ketentuan undang-undang tidak dapat segera dipraktikkan karena belum dipraktikkan. Aturan yang lebih rendah, termasuk yang diberlakukan oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah, diatur lebih lanjut. Kedua, inisiatif pengurangan sampah melalui program 3R (reuse, reduce, recycle) dinilai tidak efektif dan sulit dilaksanakan karena minimnya

				pengetahuan, fasilitas yang kurang memadai, dan sosialisasi yang mengakibatkan ketimpangan. Selain itu, inisiatif pengelolaan sampah tidak efektif karena tidak ada upaya untuk memisahkan sampah organik dan non-organik selama penanganan akhir
3.	Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib (2020)	<i>Solid Waste Management During Covid-19 Pandemic: Policy Gap and Prospects For Inclusive Waste Governance in Nigeria</i>	Penelitian Kualitatif, Dengan Mengumpulkan Beberapa Literatur Review.	Pengelolaan sampah perlu dinyatakan secara tegas sebagai layanan esensial yang dikukuhkan oleh pemerintah Nigeria dengan memberikan pernyataan kekuatan hukum. Mengakui bahwa ekonomi informal adalah langkah pertama yang paling kritis untuk menuju pembingkai kebijakan Pengelolaan Sampah Padat (<i>Solid Waste Management</i>) di mana pemangku kepentingan utama (pekerja sampah formal dan informal) dan aktor non-negara terlibat. Tingkat keterlibatan ini akan menciptakan ruang untuk dialog yang bermakna di antara para pemangku kepentingan tentang isu-isu kebijakan untuk mengkatalisasi pengelolaan sampah yang inklusif dan peningkatan kehidupan mata pencaharian mereka yang terlibat selama era pasca-Covid-19.

1. Perbedaan dan Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelle E. Daley

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelle E. Daley yaitu sama-sama menganalisis terkait dengan kesenjangan. Selain itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Michelle E. Daley yaitu menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian Michelle E. Daley menganalisis kesenjangan pada *Provision Of Coordinated Services atau Penyediaan Siswa Terkoordinasi Layanan*, sedangkan saya melakukan objek penelitian pada kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu juga penelitian yang saya lakukan menambahkan atau menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masa pandemi covid-19. Serta perbedaan yang mendasar terletak juga pada lokasi penelitian, Michelle melakukan penelitian di Maryland, sedangkan saya melakukan penelitian di Kota Makassar.

2. Perbedaan dan Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaqiu Rahman

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaqiu Rahman yaitu sama-sama fokus pada kesenjangan implementasi pada pengelolaan sampah. Selain itu pula pada penelitian ini juga menggunakan

metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Zaqiu Rahman yaitu menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada periode pengamatan antara keduanya, dimana Zaqiu Rahman melakukan penelitian di tahun 2015 yang merupakan tahun belum adanya Covid-19. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 yang dimana tahun ini masih pada masa Covid-19.

3. Perbedaan dan Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib yaitu sama-sama memiliki objek penelitian kesenjangan implementasi pengelolaan sampah selama masa pandemi Covid-19. Selain itu pula pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib yaitu menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada Fokus penelitian dimana Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib berfokus pada Sampah Padat, sedangkan penelitian ini fokus pada seluruh jenis sampah. Selain itu juga perbedaan Lokasi Penelitian yang dilakukan Thaddeus Chidi Nzeadibe dan Adaeze U.P. Ejike Aliejib Nigeria sedangkan penelitian ini

diilakukan di Kota Makassar yang dimana cara yang digunakan dalam pengelolaan sampah dimasa pandemi Covid-19 pasti memiliki perbedaan.

B. Kebijakan Publik

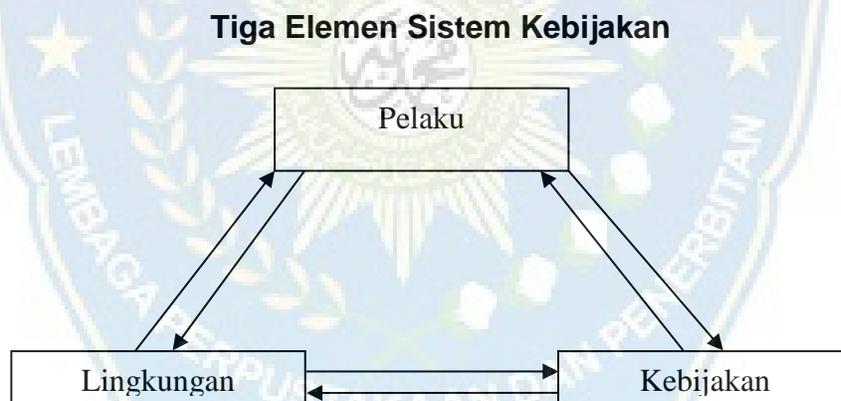
Kebijakan publik dilakukan melalui berbagai tahapan untuk menangani masalah publik, di mana tahapannya terdiri dari perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi (Beland, 2017). Tujuan kebijakan publik dapat dipahami sebagai tahapan atau fase kegiatan untuk membuat suatu kebijakan. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan publik lahir dari adanya tuntutan kebijakan yang ditunjukkan kepada kepala para pejabat publik, agar kiranya dapat bertindak untuk mengatasi masalah yang ada di dalam lingkungan masyarakat (Kustriani, 2015).

Friedrich 1969 (Agustino, 2016) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, pemerintah atau lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya kendala dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan yang diusulkan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik digunakan untuk mengatur segala yang ada di dalam Lembaga administrator publik (Silva et al., 2021). Sedangkan Anderson (Agustino, 2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat kegiatan dengan tujuan tertentu yang dikejar dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam masalah atau hal yang sedang dipertimbangkan. Kebijakan dapat dianggap sebagai

suatu sistem. Sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung yang disusun menurut aturan tertentu untuk membentuk satu kesatuan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah tindakan yang diajukan oleh seorang kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di dalam masyarakat, dimana kebijakan ini dipandangan sebagai sistem yang saling berhubungan dan bergantung dalam sebuah aturan.

Hubungan timbale balik antara ketika komponen sistem kebijakan tersebut dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar : 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam (Ayuningtyas, 2014).

Berdasarkan segitiga sistem kebijakan di atas, aktor kebijakan berdampak dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Mereka semua tunduk pada pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga bagian tersebut disebut sebagai sistem kebijakan, yang mengacu pada pengaturan kelembagaan yang berperan

dalam pelaksanaan kebijakan publik, meliputi interaksi teknis, sosial politik, dan elemen kebijakan. William Dunn (Ayuningtyas, 2014, hlm. 16) selanjutnya menjelaskan sistem dan komponen kebijakan publik secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Isi kebijakan (*policy content*)

Daftar keputusan yang dipilih lembaga dan pejabat pemerintah tentang masalah publik (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan apa pun). Isi kebijakan menanggapi berbagai isu publik yang mencakup militer, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan bidang kehidupan lainnya.

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Individu atau kelompok yang terkait langsung dengan suatu kebijakan, yang dikenal sebagai pemangku kebijakan atau aktor kebijakan, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Warga, serikat pekerja, pedagang kaki lima, komunitas jurnalis, partai politik, instansi pemerintah, dan lain-lain bisa menjadi aktor kebijakan.

c. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan adalah konteks di mana suatu kebijakan diimplementasikan, dan itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik.

Proses Kebijakan

Membuat kebijakan merupakan langkah penting dalam pengembangan kebijakan karena menentukan bagaimana kebijakan berdampak pada tujuan kebijakan.. Langkah-langkah proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

a) Pembuatan Agenda (*Agenda setting*)

Menjadikan agenda kebijakan publik sebagai pertemuan tiga “pilar pertimbangan” krusial, yaitu masalah, potensi pemulihan, dan konteks politik. Ketika masalah, solusi potensial, dan keadaan politik "bertemu dan mengalir" ke arah yang positif, sebuah "jendela" untuk pembuatan kebijakan terbuka, sesuai dengan definisinya. Sebuah hukum publik atau modifikasi kebijakan mungkin dihasilkan dari konvergensi masalah dan solusi prospektif dalam proses pembuatan kebijakan (Ayuningtyas, 2014).

b) Formulasi Kebijakan

Sebagian besar komponen dari siklus perencanaan mendalam Htwe terlibat dalam perumusan kebijakan, yang merupakan proses berulang (Ayuningtyas, 2014, hlm. 32). Sebuah sistem harus dapat mengontrol dan menegakkan konflik atau resolusi konflik untuk mengubah permintaan ini menjadi kebijakan. Akibatnya, sebuah sistem akan melindungi dirinya sendiri dengan menghasilkan output yang cukup memuaskan, membangkitkan ikatan yang berakar pada sistem, dan

menggunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuatan atau otoritas (Ayuningtyas, 2014, p. 32–33)

c) Pengadopsian Kebijakan

Adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan (Ayuningtyas, 2014)

d) Pengimplementasi Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi menurut Dunn adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Menurut Hann dalam Dumilah (2014) Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya (Ayuningtyas, 2014)

e) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu mekanisme pengawasan kebijakan. Parameter yang umum digunakan adalah kesesuaian, relevansi, kecukupan, efisiensi, keefektifan, keadilan, respon, dan dampak.

Kesesuaian evaluasi harusnya dikembangkan untuk mencakup tidak hanya proses, tetapi juga dampak jangka panjang dan jangka pendek dari sebuah kebijakan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Htwe dalam (Ayuningtyas, 2014)

Masalah Kebijakan

Sifat-sifat masalah kebijakan menurut William Dunn dalam (Winarno, 2012, p. 77), mengemukakan setidaknya ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yakni:

a) Saling ketergantungan

Isu kebijakan energi, misalnya, dapat berdampak pada bidang kebijakan lain seperti perawatan dan respons kesehatan. Isu kebijakan bukanlah isu yang terisolasi; mereka adalah bagian dari sistem masalah yang lebih besar yang dikenal sebagai kekacauan, yang merupakan kumpulan faktor eksternal yang menyebabkan ketidakpuasan di antara berbagai kelompok masyarakat.

b) Subyektivitas

Kondisi eksternal yang menyebabkan masalah secara selektif ditentukan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi. Individu dan kelompok pihak yang berkepentingan harus mengidentifikasi masalah

karena tidak dapat menggambarkan dirinya sendiri. Pendekatan ini menggabungkan pengalaman subjektif individu

c) Sifat buatan

Masalah kebijakan adalah hasil penilaian subjektif manusia, tetapi juga dapat dianggap sebagai definisi sebenarnya dari kondisi sosial objektif, sehingga dipahami, dipelihara, dan dimodifikasi secara sosial.

d) Dinamika masalah kebijakan

Ada banyak kemungkinan solusi untuk suatu masalah karena ada kemungkinan definisi dari kesulitan-kesulitan ini. Solusi yang diusulkan untuk memperbaiki masalah pada akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana individu menafsirkan situasi. Suatu masalah akan menjadi masalah jika didefinisikan, dianalisis, dan diartikulasikan oleh orang atau kelompok yang tertarik untuk memecahkannya. Akibatnya, diperlukan pengalaman subjektivitas individu (Winarno, 2012).

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk mendapatkan hasil (Maryam et al., 2021). Implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah berupa program dan keputusan yang konkrit terkait cara untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan untuk mengatasi dampak dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012, p. 101–102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015) Implementasi adalah proses generik, dan tindakan administratif dapat diselidiki pada tingkat program. Ekawati (Taufik & Isral, 2013, p. 136) juga menyatakan bahwa tindakan oleh individu/kelompok swasta (swasta) dan publik yang secara langsung ditujukan untuk mencapai serangkaian tujuan berkelanjutan dalam keputusan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya, implementasi didefinisikan. Kemudian menurut Gordon (Mulyadi, 2015) implementasi mengacu pada berbagai kegiatan yang ditujukan untuk terwujudnya suatu program.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sarana guna untuk menangani atau mengatasi masalah yang terdampak dari implemntasi kebijakan itu sendiri, dan merupakan alat administrasi hukum sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang mampu bekerjasama guna untuk sebuah tujuan.

Semakin banyak ahli yang memberikan pendapat mereka pada tahap proses kebijakan ini, implementasi pasti menjadi topik diskusi yang semakin meningkat. Meskipun beberapa penulis menyusun langkah-langkah implementasi kebijakan dalam berbagai urutan, namun pada kenyataannya

setiap kebijakan publik diikuti dengan kebijakan implementasi. Klaim yang dibuat oleh Edwards III bahwa keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa implementasi yang baik mendukung sudut pandang ini.

Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat berbagai model pendekatan implementasi kebijakan yang dijadikan sebagai acuan atau rekomendasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Pendekatan implementasi kebijakan ini akan berdampak pada persetujuan publik. Berikut model dan cara pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut (Nugroho, 2014) ada dua macam aliran atau pengetahuan dalam memahami kebijakan publik:.

- 1) Kontinentalis, yang meyakini bahwa kebijakan publik merupakan turunan dari hukum, dan yang terkadang memandang perkembangan hukum dan kebijakan publik, khususnya hukum publik atau hukum tata negara, sebagai proses interaksi antar lembaga negara.
- 2) Anglo-Saxonists, Mereka melihat kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara negara dan rakyat dan merupakan produk sampingan dari demokrasi politik.

(Nugroho, 2014, p. 665–678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

- 1) Model Van Meter dan Van Horn Model pertama adalah klasik, terutama model yang dibuat oleh Carl dan Donald Van Meter. Model ini mengandaikan bahwa kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan semuanya mengalir dalam satu jalur yang lurus. faktor yang mempengaruhi kebijakan publik meliputi:
 - Pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antar organisasi
 - Karakteristik instansi/pelaksana pelaksana
 - Keadaan ekonomi, masyarakat, dan politik
 - Kecenderungan pelaksana (predisposisi)
- 2) Model Mazmanian dan Sebatier Model kedua, diusulkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier, mengusulkan bahwa implementasi adalah proses menempatkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan. Kerangka model Analisis Implementasi mencakup model Mazmanian dan Sebatier. Proses implementasi kebijakan diklasifikasikan menjadi tiga variabel dengan model Mazmanian Sebatier.. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu mudah atau tidaknya penanganan masalah dari segi indikator tantangan implementasi teoretis dan teknologi, keragaman objek, dan modifikasi yang diinginkan. Kedua, variabel kemampuan kebijakan untuk menyusun proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, penggunaan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, integrasi hierarkis antar lembaga pelaksana, peraturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan

rekrutmen pejabat pelaksana dan keterbukaan terhadap pihak luar; dan variabel non-kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Dan *Ketiga* variabel dependen, yaitu Tahapan proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari instansi/lembaga pelaksana berupa kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan atau seluruh dasar kebijakan.

- 3) Model Hoodwood dan Gun Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun yang digunakan untuk melakukan implementasi kebijakan yang memerlukan beberapa syarat. *Syarat pertama*, berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. *Syarat kedua*, adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. *Syarat ketiga*, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, yang artinya kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumberdaya atau sumber-aktor. *Syarat keempat* adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. *Syarat kelima* adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit

hubungan antara sebab-akibat, maka semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. *Syarat keenam* adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. *Syarat ketujuh* adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. *Syarat kedelapan* adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. *Syarat kesembilan* adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi. *Syarat kesepuluh* adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan –tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

- 4) Model Goggin Bowman, dan Lester Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester membangun implementasi kebijakan yang lebih ilmiah,

mengutamakan pendekatan metode penelitian dengan variabel independen, intervening, dan dependen, serta menetapkan pertimbangan komunikasi sebagai motor penggerak dalam implementasi kebijakan.

5) Model Grindle Model kelima adalah model Merilee S.Grindle yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya merupakan model kelima. Konsep esensialnya adalah bahwa implementasi kebijakan terjadi setelah kebijakan diubah. Tingkat implementasi kebijakan menentukan keberhasilannya. Isi kebijakan tersebut antara lain:

- Kepentingan yang akan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.
- Jenis keuntungan yang akan dihasilkan.
- Tingkat modifikasi yang diinginkan.
- Posisi pembuat kebijakan;
- (Siapa) mengeksekusi program.
- Sumber daya dikerahkan.

Model Grindle adalah pemahaman menyeluruh tentang pengaturan kebijakan, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksana, penerimaan implementasi, potensi zona konflik antara aktor pelaksana, dan kondisi implementasi sumber daya yang diperlukan.

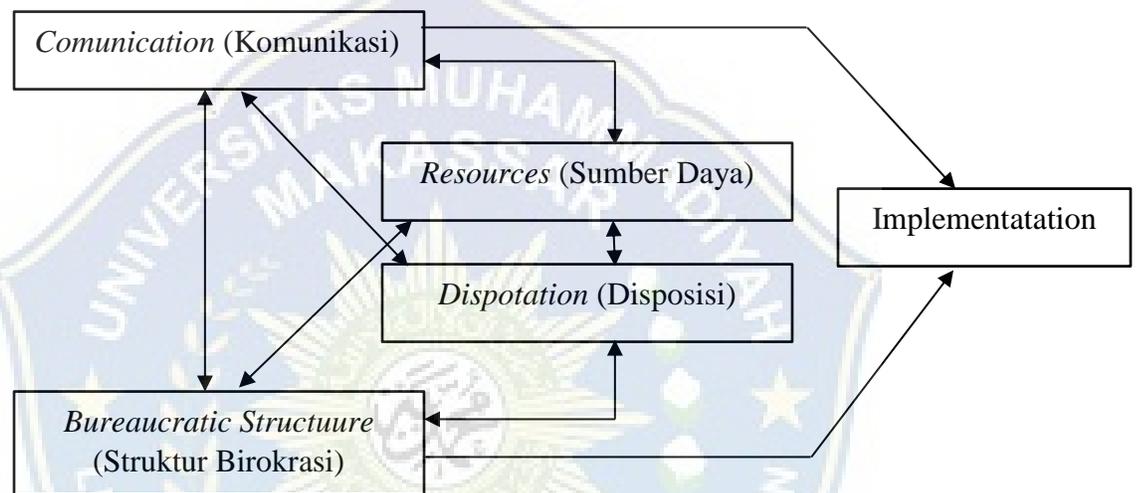
6) Model Elmore dkk. Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David

O'Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

- 7) Model Edward George Edward III yang mengklaim bahwa masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada implementasi. Dia percaya bahwa kebijakan politisi tidak akan berhasil kecuali diterapkan secara efektif. Implementasi kebijakan yang efektif harus memperhatikan empat faktor utama: struktur birokrasi, disposisi atau sikap, sumber daya, dan komunikasi.
- Komunikasi tentang sikap dan reaksi orang-orang yang terlibat, serta bagaimana kebijakan disampaikan kepada organisasi dan/atau publik.
 - Sumber daya (Resources) meliputi aksesibilitas sumber daya pembantu, khususnya sumber daya manusia, yang terkait dengan kapasitas pelaksana kebijakan publik untuk melakukannya dengan sukses.

- Desposition (Desposisi) terhadap kesiapan implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan.
- Struktur Birokrasi yang mengarahkan implementasi kebijakan publik terkait yang sesuai dengan organisasi birokrasi.

Gambar 2.2 Model Edward III



- Model Nakamura & Smalwood Model kebijakan sebagai *environments influencing implementation*, yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat *actors and arenas*.
- Model Jaringan Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah jaringan pemain otonom dengan proses interaksi yang kompleks di antara sejumlah besar aktor. Semua aktor dalam jaringan relatif otonom dalam model ini, yang berarti mereka semua memiliki tujuan yang berbeda. Tidak ada koordinator atau aktor sentral. Koalisi dan/atau

kesepakatan di antara aktor inti jaringan merupakan penentu implementasi kebijakan dan keberhasilan strategi ini.

C. Kesenjangan Implementasi

Dalam sebuah kebijakan publik, proses Implementasi kebijakan sangatlah berpengaruh dimana dengan adanya Implementasi kebijakan arah tujuan kebijakan publik akan terealisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah, namun tidak selamanya kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah berjalan dengan sesuai dengan ketetapannya, bahkan masih sering kali mengalami kesenjangan implementasi kebijakan, dimana Kesenjangan Implementasi terjadi pada saat kebijakan hanya berlaku di atas kertas saja dan sulit dalam implementasinya (Cahyaningrum & Halim, 2015). Kesenjangan implementasi memberikan sebuah tafsiran baru bahwa ketidakmampuan antara rumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, dimana kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik hingga 60% dari sebuah keberhasilan .

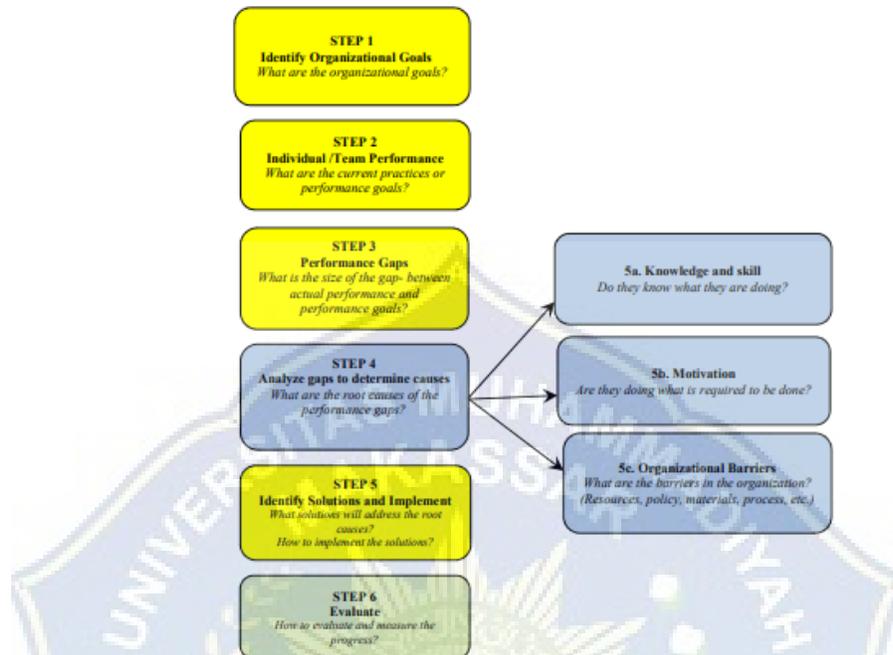
Implementasi kebijakan publik terkadang menemui kesenjangan implementasi, yaitu suatu keadaan di mana mungkin ada ketidaksesuaian antara apa yang dimaksudkan dan apa yang harus dicapai selama pengembangan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kapasitas pemerintah dan aktor tertentu untuk melaksanakan kebijakan dengan cara yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mereka. (Wahab, 2015).

Kesenjangan Implementasi dapat dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu:

- *No implementation*, yang menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud karena orang-orang yang bersangkutan tidak mau bekerja sama, melakukan tugasnya secara tidak efisien, bekerja dengan enggan, atau bertindak di luar batas kekuasaannya. Ini berarti bahwa terlepas dari upaya terbaik mereka, mereka tidak dapat mengatasi tantangan yang muncul dengan sendirinya.
- *Unsuccessful implementation* yaitu kebijakan yang telah diberlakukan tetapi tidak menghasilkan hasil yang diinginkan karena keadaan lain. Kebijakan terancam gagal karena implementasi yang buruk, kebijakan yang buruk, atau nasib buruk (Hogwood dan Gunn, 1986) dalam (Wahab, 2015).

(Daley, Michelle. E, 2019) mengemukakan dalam penelitiannya untuk menganalisis kesenjangan Implementasi Kebijakan ditinjau dengan 6 tahapan sebagai berikut:

Gambar: 2.3 The Six Steps of the Gap Analysis Process



Sumber: Penelian Daley, Michelle. E, 2019

D. Pengelolaan Sampah Di Masa Pandemi Covid-19

Sampah perkotaan atau pemukiman merupakan masalah yang memerlukan perhatian yang cukup besar karena terus bertambah dari tahun ke tahun sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Masalah sampah akan semakin parah jika produksi sampah meningkat tanpa diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Limbah dapat mempengaruhi infrastruktur kota, termasuk kesehatan dan kerentanan lingkungan, seperti yang diakui secara luas. (Wildawati & Hasnita, 2019) Sistem pengolahan sampah di Indonesia umumnya masih terbilang tradisional dimana seringkali akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah

secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (Nagong, 2020) Sampah adalah suatu benda atau bahan yang telah dibuang karena tidak berguna lagi bagi manusia. Persepsi masyarakat terhadap sampah adalah menjijikan, kotor, dan harus dibakar atau dibuang dengan benar (Mulasari, 2012).

Masalah sampah memiliki 3 komponen: hilir, proses, dan hulu. Pembuangan sampah terus meningkat di sisi hilir. Baik masyarakat maupun pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas untuk bagian proses. Upstream berupa sistem yang kurang optimal yang diterapkan pada pengolahan akhir (Mulasari et al., 2016). Kebanyakan orang menganggap pembakaran sampah sebagai bagian dari proses pengolahan sampah. Hal-hal seperti itu, di sisi lain, dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan seseorang. Tidak sesederhana memutar telapak tangan untuk meningkatkan kesadaran publik. Semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pendukung pihak ketiga, harus bekerja sama. Kesadaran itu membutuhkan waktu lama untuk berkembang.

Pelanggaran sampah terus menjadi penyumbang pencemaran lingkungan yang signifikan di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia dianggap sebagai tempat pembuangan sampah plastik laut terbesar kedua setelah China. Oleh karena itu, warga harus menyadari banyaknya jenis sampah dan bagaimana cara menanganinya dengan baik. Secara umum, sampah dipecah

menjadi tiga kategori: sampah berdasarkan sumber, sifat, dan bentuk. Berikut adalah beberapa kategori limbah yang perlu dipahami lebih detail.

Jenis sampah berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:

- Sampah Alam, adalah sampah yang dibuat oleh satwa liar dan dimasukkan melalui prosedur daur ulang organik, seperti penguraian daun kering menjadi tanah di hutan. Sampah seperti ini akan mencemari lingkungan jika tidak ditangani.
- Sampah Industri, merupakan kategori limbah yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun residensial (rumah tangga). Limbah dari tambang, radiasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir, dan jenis limbah industri lainnya adalah beberapa contohnya.
- Sampah Nuklir, merupakan jenis limbah yang mengandung residu radioaktif aktif. Rumah sakit juga dapat menghasilkan limbah ini, yang seringkali dihasilkan dari sisa-sisa reaktor tenaga nuklir. Selain itu, penambangan uranium, pemrosesan radium, dan beberapa inisiatif ilmiah lainnya juga menghasilkan limbah nuklir.
- Sampah Konsumsi, merupakan kategori sampah yang dibuat oleh manusia, termasuk sisa makanan. Dibandingkan dengan limbah yang dihasilkan oleh proses pertambangan dan industri, jenis ini menghasilkan lebih sedikit sampah.

Sampah padat dan sampah cair merupakan dua kategori sampah yang dipisahkan berdasarkan bentuknya. Setiap zat buangan yang bukan kotoran manusia, urin atau limbah cair disebut sebagai limbah padat. Sedangkan limbah cair adalah cairan bekas yang dapat dibuang ke TPA tanpa harus dikembalikan.

Sampah anorganik dan sampah organik adalah dua kategori sampah berdasarkan sifatnya. Sampah yang tidak mudah hancur antara lain kertas, mainan plastik, botol, gelas minum, serta botol dan wadah plastik. Jenis sampah ini juga terkadang disebut sebagai limbah yang dihasilkan dari produk yang diproduksi oleh manusia, bukan dari bahan biologis yang ditemukan di alam.

- Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah busuk meliputi gelas minum, kertas, mainan plastik, botol, dan wadah yang terbuat dari plastik. Jenis sampah ini juga terkadang disebut sebagai limbah yang dihasilkan dari produk yang diproduksi oleh manusia, bukan dari bahan biologis yang ditemukan di alam. Dengan cara ini, cukup sederhana untuk mengolah atau menjual sampah anorganik.
- Sampah organik merupakan di antara jenis sampah yang biasanya dikomposkan. Sampah jenis ini berbeda dengan sampah anorganik karena cepat terurai. Contoh sampah jenis ini antara lain sisa makanan, sayuran, dedaunan dan produk sampah organik lainnya.

- Selain sampah anorganik dan organik, Selain itu, ada sampah yang cukup beracun. Jenis sampah ini biasanya dihasilkan oleh limbah industri dan medis. Sampah B3 juga bisa diakibatkan oleh bencana alam dan penghancuran material konstruksi. Sampah B3 biasanya merupakan jenis sampah berulang yang tidak dapat ditangani secara teknologi. Sampah yang berasal dari masyarakat dan daerah tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang kemudian diangkut dan dibuang di tempat pembuangan akhir (Zulkifli, 2014).

Terlebih lagi di Masa Pandemi Covid-19 pengelolaan sampah tentu berbeda, dimana di masa Pandemi Covid-19 ini Masyarakat baik sampah dan jenis-jenis sampah akan bertambah, dimana Wabah COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa sebuah perubahan tidak bisa dihindari, bekerja sebagai katalis bagi institusi pemerintahan untuk tumbuh dan memilih platform dengan teknologi, yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sektor pemerintahan telah berjuang untuk bertahan dari krisis dengan pendekatan yang berbeda dan digitalisasi tantangan untuk menghapus ancaman pandemi. Pendidikan dibahas dan beberapa saran yang bermanfaat juga ditunjukkan untuk melakukan kegiatan pendidikan selama situasi pandemi. (Jena, 2020).

Pandemi Covid-19 telah diketahui telah mengubah dinamika timbulan sampah global sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus (Bhakta, 2020). Peralatan pelindung diri, masker bekas, sarung tangan adalah kontribusi utama volume limbah. Penanganan limbah infeksius merupakan peralihan

global yang besar terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan jika ditangani secara tidak tepat (Ilyas et al., 2020).

Masyarakat di kota Makassar dihimbau untuk makan makanan sehat untuk membangun kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan, yang akan membuat mereka aman dari virus Covid-19. Ini akan memastikan bahwa tubuh mereka terlindungi dari semua infeksi. Pada umumnya anak usia dini belum mengetahui cara hidup bersih dan sehat; sebaliknya, mereka hanya membeli makanan ringan yang menurut mereka menggugah selera dan membuat penasaran, tanpa memikirkan konsekuensinya. Di masa pandemi seperti ini, proses menginformasikan dan mendidik anak sangat penting untuk mencegah kerentanan mereka terhadap penyakit dan virus. (Yusriani 2020).

Pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengomposan di rumah, pemilahan sampah organik dan anorganik selama penyimpanan, serta pengurangan penggunaan produk non-biodegradable. (Yolarita 2011). Menurut Candra (2012), Perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan adalah tiga tahap di mana gagasan keterlibatan dapat dievaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah mengacu pada bergabung dengan kelompok yang menangani masalah sampah dan berkontribusi pada desain sistem pengelolaan sampah yang efektif, serta mengambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. (Yuliastuti et al. 2013) menambahkan bahwa partisipasi tidak langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dimungkinkan. Yang

dimaksud dengan “partisipasi tidak langsung” adalah keterlibatan masyarakat dalam masalah keuangan, seperti partisipasi dalam pengelolaan sampah melalui pembayaran iuran melalui organisasi afiliasi yang secara langsung melakukan jasa kebersihan.

Menurut berbagai justifikasi yang diuraikan di atas, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah proyek untuk mengubah sampah menjadi barang berharga. Masyarakat dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah dengan berbagai cara, antara lain dengan menyediakan sumber daya, tenaga, gagasan dan pemikiran. Agar inisiatif pengelolaan sampah berhasil mengatasi masalah masyarakat dengan sampah rumah tangga, khususnya di daerah perkotaan, partisipasi merupakan komponen yang sangat penting. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis partisipasi masyarakat yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. integrasi langsung, seperti memfasilitasi penggunaan bahan biodegradable, memilah sampah, memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara, mendaur ulang sampah, dan melakukan tugas pembersihan bekerja sama dengan pihak lain untuk bakti sosial lingkungan. Partisipasi tidak langsung meliputi hal-hal seperti membayar denda sampah, mengikuti penyuluhan atau pelatihan sampah, dan memberikan ide atau tanggapan kepada RT/RW mengenai sistem pengelolaan sampah masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dari ciri-ciri internal dan pengaruh lingkungan eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di lokasi tempat tinggalnya, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin banyak pula pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

2. Pengetahuan

Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah akan berpengaruh pada besarnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah guna menjaga kebersihan lingkungan. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3. Persepsi

Kesan masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang bebas sampah. Ibu rumah tangga lebih cenderung ikut serta dalam menjaga

kelestarian lingkungan jika memiliki pandangan yang positif terhadap kebersihan lingkungan. Siswa yang berpendapat bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting biasanya akan berusaha melakukannya.

4. Pendapatan

Partisipasi dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat memiliki hubungan tidak langsung dengan pendapatan. Kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan sampah ke TPA untuk diolah, memerlukan biaya operasional. Demikian pula, berbagai jasa lingkungan tersedia. Masyarakat membayar biaya operasional melalui pembayaran iuran pengguna. Akibatnya, besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat. (Yuliasius 2013) menemukan bahwa jumlah uang yang diperoleh melalui pengabdian masyarakat berdampak pada partisipasi pengelolaan sampah.

5. Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat

Peran pemerintah atau tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan sosialisasi pengetahuan pengelolaan sampah menjadi penting. Sosialisasi ini akan membantu masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan oleh setiap individu sehingga permasalahan sampah dapat diatasi dari sumbernya, artinya sumber timbulan sampah. Selanjutnya, fungsi pemerintah/tokoh masyarakat terkait dengan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Sarana dan prasarana

6. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan sampah, sarana dan prasarana mengacu pada fasilitas yang ada yang membantu dalam proses pengelolaan sampah. Tempat sampah yang memisahkan sampah organik dan non-organik adalah contohnya, seperti halnya sarana pengangkutan sampah yang biasa disediakan oleh petugas. Diketahui salah satu masalah yang mengurangi partisipasi masyarakat adalah kurangnya pelayanan dan infrastruktur pengelolaan sampah. Penelitian ini berfokus pada elemen persepsi berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan.

Dan tentunya sebagai salah satu kota yang memberlakukan pembatasan, peraturan Kota Makassar yang memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk berkumpul di tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan restoran, berdampak signifikan bagi para pengusaha kuliner di kota tersebut. . Pelayanan Sosial Jangkauan Luas (PSBB). Profesional kuliner kini semakin berhati-hati dalam menjual produknya dan memperhatikan bagaimana makanan dan minuman disiapkan sebelum didistribusikan ke pelanggan akibat wabah COVID-19. Dengan menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai saat mengolah makanan, beberapa chef mulai lebih memperhatikan kebersihan.

Langkah-langkah tersebut di atas membantu mempertahankan kepercayaan konsumen bahwa makanan yang dijual atau disediakan oleh vendor telah disiapkan dengan cara yang aman, higienis, dan sehat. Standar kebersihan

dan keamanan makanan dan minuman olahan ditegakkan dan ditentukan tidak hanya selama penyiapan dan penyajian makanan, tetapi juga selama proses pengiriman. Sebagian besar penjual akan mengemas makanan yang mereka tawarkan dengan rapi dan merata dengan tambahan hingga tiga lapis plastik untuk menampung pesanan makanan dan minuman dalam jumlah besar.

Tinjauan Kebijakan tentang Pengelolaan sampah

UU No. 18 Tahun 2008 mendefinisikan pengurangan sampah melalui UU 3R sebagai:

- a. Pembatasan (*Reduce*): berusaha untuk menghasilkan limbah sesedikit mungkin.
- b. Guna-Ulang (*reuse*): Jika limbah akhirnya berkembang, usahakan untuk segera memanfaatkan limbah tersebut.
- c. Daur ulang (*recycle*) proses pengolahan atau pemanfaatan sisa makanan atau limbah yang tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan mentah atau sumber energi. (Usman & Can, 2021).

Tinjauan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah

Menurut Pasal 1, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang bernilai ekonomis dan dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Bank sampah juga dapat dianggap sebagai pendekatan komunitas untuk mengelola sampah kering yang mendorong

partisipasi aktif. Sistem ini akan menangani, mengklasifikasikan, dan mendistribusikan sampah dengan harga pasar sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan finansial dari daur ulang sampah. (Sasmito, 2017).

Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menindaklanjuti UU No. 18 tahun 2008 dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai amanah UU No. 18 Tahun 2008, peraturan ini juga memberi wewenang kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah dari hulu dengan melakukan prinsip *reuse, reduce dan recycle*. Jadi pada prinsipnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebuah keiscayaan. Pelibatan masyarakat dimulai dengan rencana penanganan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan/atau pemanfaatan kembali sampah, dengan pengurangan sampah dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana penggunaan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dasar hukum pengelolaan persampahan yang digunakan di Kota Makassar adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dari sampah memang sangat perlu untuk dilakukan penanganan sampah, serta melibatkan

masyarakat dan dunia usaha secara profesional agar penanganan sampah bisa berjalan efektif dan efisien.

E. Kerangka Pikir

Kerangka penelitian disusun untuk menjelaskan variable mana yang menjadi fokus penelitian, yang di dasarkan pada kajian pustaka dan teori yang mendukung. Berikut ini dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan variabel yang akan diteliti.

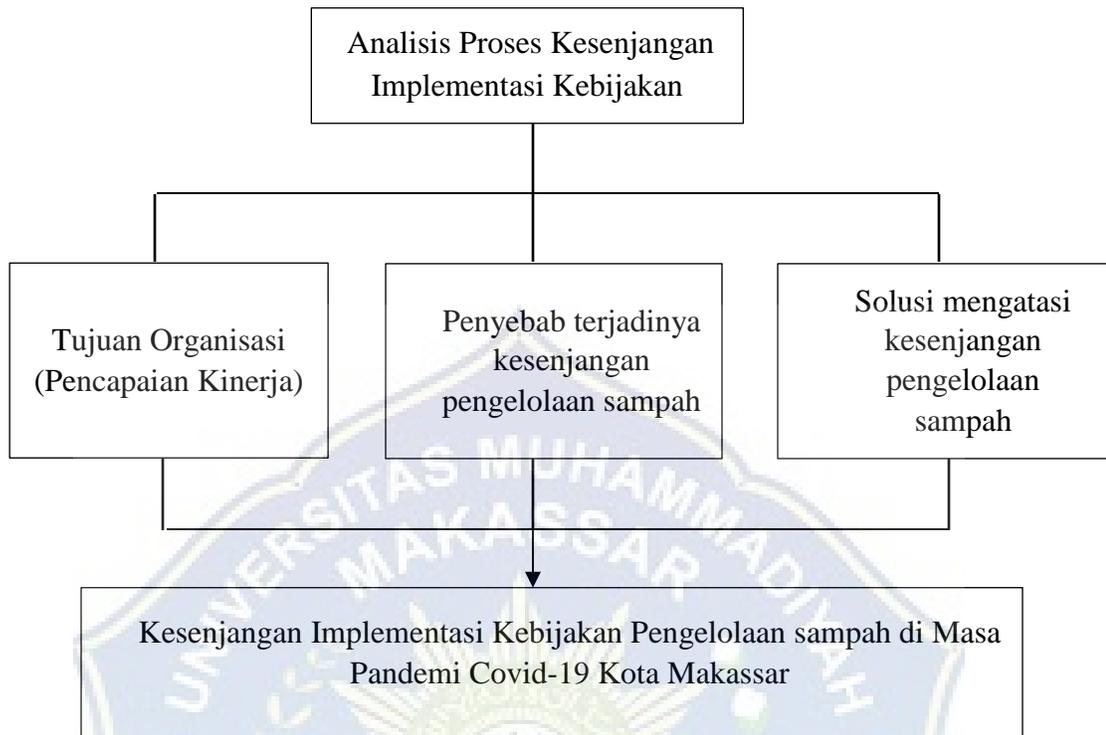
Dalam hal ini peneliti melihat untuk mengetahui kesenjangan implementasi pengelolaan sampah di masa pandemi covid-19 Kota Makassar, peneliti meninjau dari berbagai teori bahwa untuk mengukur kesenjangan implementasi diperlukan beberapa tahapan yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh (Daley, Michelle. E, 2019) yang mengemukakan bahwa ada 6 tahapan yang perlu dilakukan dalam melihat kesenjangan implementasi yaitu :

- (1) Mengidentifikasi Tujuan Organisasi,
- (2) Melihat Kinerja Individu/Tim,
- (3) Berapa Ukuran kesenjangan kinerja actual dan sasaran kinerja,
- (4) Menganalisis apa akar penyebab kesenjangan,
- (5) Identifikasi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut,
- (6) Evaluasi.

Namun dalam pertimbangan peneliti untuk melihat kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada masa pandemic Covid 19 Kota Makassar hanya merujuk kepada 3 tahapan dari 6 tahapan yang digunakan oleh (Daley, Michelle. E, 2019) dalam menganalisis kesenjangan

implementasi dengan alasan peneliti hanya ingin melihat dan menganalisis bahwa untuk mengetahui kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu dengan : (1) mengidentifikasi tujuan organisasi/Pencapaian Kinerja Organisasi, (2) Penyebab terjadinya kesenjangan, (3) Identifikasi solusi dalam mengatasi masalah kesenjangan, karena menurut peneliti untuk melihat kesenjangan implementasi kebijakan dari pengelolaan sampah hanya dengan menggunakan 3 tahapan tersebut sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya kesenjangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah pada masa pandemic covid-19 di Kota Makassar, dengan gambaran sebagai berikut:





Gambar 2.4 : Kerangka Pikir

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Pencapaian kinerja organisasi dalam pengelolaan sampah di kota makassar mengacu pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah, dimana dalam Hal ini sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup memilih target dan tujuan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar mengacu perwali makassar tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis ruma tangga bahwa Target pengurangan sampah dan penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Bahwa: (1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampahnya rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025, dan (2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

- Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “*Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Dan Berwawasan Lingkungan*”.
 - b. Misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang dibantu dengan peningkatan standar sarana, prasarana, dan kemampuan intelektual, mental, dan spiritual.

- Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk menyediakan ruang hidup yang nyaman.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
- Eksistensi dalam penanganan dan pengurangan sampah di Kota Makassar dinilai masih sangat jauh dari apa yang menjadi target dari Dinas Lingkungan Hidup dimana Berdasarkan data yang di dapatkan jika diasumsikan bahwa setiap orang perhari menghasilkan sampah 0.7 Kg maka jumlah sampah yang dihasilkan perhari adalah 999.333.300 Kg atau 9.333 ton/hari dikalikan satu tahun (365 hari) maka 270.00.000 ton sampah/tahun. Jika dilihat dari nilai Ideal reduksi pengelolaan sampah sebanyak 30% maka total sampah pertahun sebanyak 81.000.000 ton sampah/tahun, namun nyatanya sampah yang di reduksi oleh UPTD Kota Makassar hanya 646.125,333 kg atau 73.500 ton/pertahun, yang mana ini masih sangat jauh dari target nilai ideal reduksi pengelolaan sampah. Sedangkan untuk penanganannya sendiri yang mencakup 70% itu sama sakali masih sangat jauh dari harapan dimana dari 229 bank sampah unit yang ada di Kota Makassar, dari tahun 2016-2022 mengalami pengurangan dalam reduksi sampah, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa sampah bisa bernilai ekonomi , padahal dalam hal penanganan saampah partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan serta visi dan misi dalam penanganan sampah yang ditetapkan oleh Dinas

Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah, masih kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat.

- Mencari tahu apa penyebab terjadinya kesenjangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di masa pandemic Covid-19 Kota Makassar, sehingga bisa menjadi masukan-masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah yang ada Kota Makassar.
- Memberikan solusi dan harapan sehingga target yang di tetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar bisa berjalan maksimal sesuai dengan kebijakan yang ada.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendekatannya, berdasarkan jenis data yang digunakan. Jika ditinjau dari sasaran kebijakan, Tujuan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif adalah untuk mengukur kerawanan kinerja para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, besar ukuran kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan sampah dan penyebab terjadinya kesenjangan Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah serta solusi dalam mengatasi kesenjangan Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Masa Pandemi Covid-19 ini dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini dimulai sejak diusulkannya proposal penelitian, yaitu pada bulan Februari s.d Maret 2022.

C. Sumber Data

1) Data Kualitatif

Populasi penelitian adalah seluruh pelaksana pengelolaan sampah Kota Makassar dan penanggung jawab pelaksanaan peraturan

pengelolaan sampah kota. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan yang diwawancarai untuk memperoleh data – data kualitatif dalam rangkai mengungkap kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar, ditentukan dengan tujuan dan sasaran tertentu dalam pikiran secara purposive.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling krusial karena pengumpulan data dan informasi tentang topik penelitian merupakan tujuan utama penelitian. Mekan untuk mendapatkan informasi dan fakta paling akurat dari keadaan empiris dalam penyelidikan ini, cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut (Nasution, 2015, p. 226), “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kinerja dan hasil kerja pelaksana dalam implementasi kebijakan di lokasi penelitian. Observasi ini untuk melihat kesenjangan implementasi kebijakan dan praktek dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

a) Kinerja Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan

Kinerja organisasi yang dimaksud meliputi bagaimana tingkat pencapaian yang dilakukan oleh pihak Pelaksana Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

b) Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana Proses keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, di mana berbagai informan diwawancarai menggunakan berbagai daftar pertanyaan yang memberikan ruang bagi potensi untuk mengajukan pertanyaan segar yang secara alami berkembang dari konteks percakapan.

Menurut Estberg dalam (Sugiyono, 2015, p. 232), "Wawancara merupakan inti dari penelitian sosial," demikian argumen tersebut. Hampir setiap majalah sosiologis yang Anda konsultasikan akan menunjukkan kepada Anda betapa wawancara mendalam dan standar digunakan dalam penelitian sosial. Inti dari penelitian sosial adalah wawancara. Semua penelitian sosial didasarkan pada wawancara umum dan mendalam, menurut publikasi ilmu sosial. Untuk mencegah informan merasa tertekan untuk menyampaikan informasi, peneliti bekerja untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Wawancara ini dilakukan terhadap informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Implementasi Kebijakan pengelolaan

sampah, yang terdiri dari Organisasi Pelaksana dan Masyarakat di Kota Makassar, wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara.

3. Studi Dokumentasi

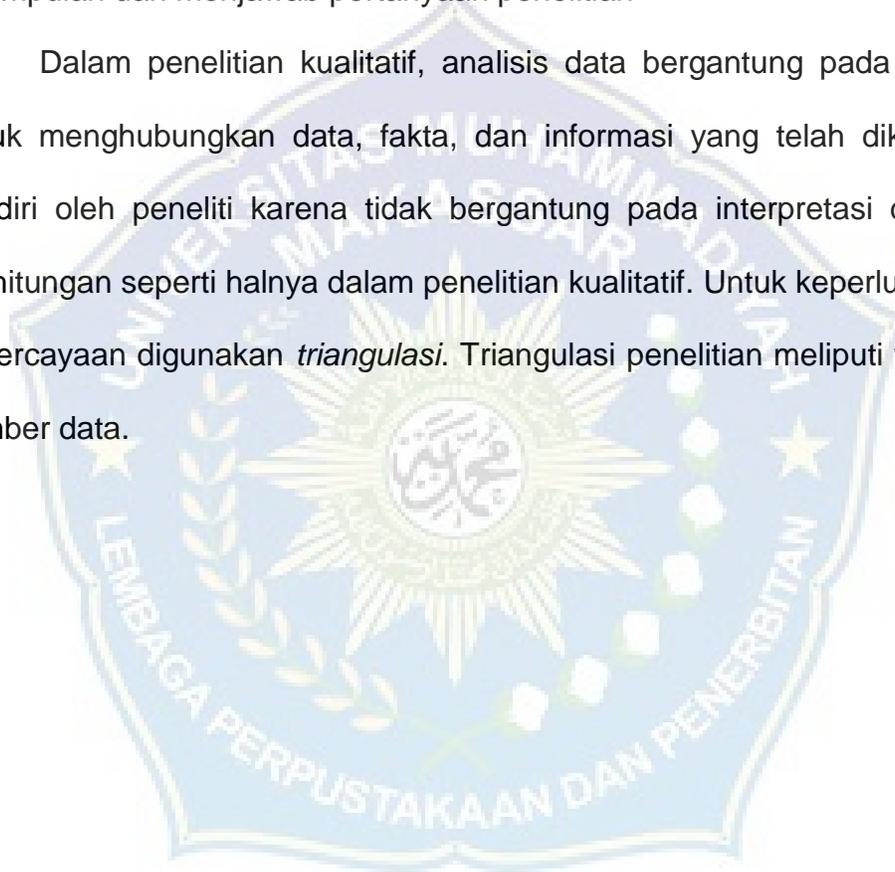
Karena didukung oleh bukti dokumenter, temuan penelitian berdasarkan observasi dan wawancara mendalam akan lebih dipercaya dan dapat diandalkan. Mempelajari bahan atau dokumen tertulis untuk mendukung temuan penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Dalam proyek ini, dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan melindungi berbagai data pendukung. Semua rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijawab dengan menggunakan dokumentasi. Materi ini akan menambah pemahaman atau informasi penelitian. Informasi dalam dokumentasi berasal dari buku harian, gambar, dan rekaman audio yang diambil di Lokasi Penelitian selama wawancara mendalam. Bahan ini digunakan untuk mendukung informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif kuantitatif akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif, menganalisis evaluasi informan/responden tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar untuk melihat seberapa baik kinerja organisasi pelaksana dalam melaksanakannya serta proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Pengolahan data kualitatif yang diperoleh dari informan melalui wawancara melalui tahapan: penulisan transkrip rekaman wawancara, pemilahan data, pengkodean data dan interpretasi. Dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, (*qualitative content analysis*) untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bergantung pada kapasitas untuk menghubungkan data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti karena tidak bergantung pada interpretasi data pada perhitungan seperti halnya dalam penelitian kualitatif. Untuk keperluan derajat kepercayaan digunakan *triangulasi*. Triangulasi penelitian meliputi waktu dan sumber data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada hasil penelitian ini juga menjelaskan mengenai gambar umum terkait dengan lokasi penelitian tentang Profil Kota Makassar dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang sebagai regulator dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah sebuah kotamadya dan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Sering ditulis sebagai Makassar atau Mangkasar dan dikenal secara resmi sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang dari tahun 1971 hingga 1999. Kota Makassar berada di lokasi yang vital karena berada di persimpangan jalur lalu lintas yang membentang dari provinsi selatan dan utara Sulawesi. , dari barat ke timur Indonesia, dan dari utara ke selatan. Kota Makassar terletak antara 1 hingga 25 meter di atas permukaan laut, dengan koordinat geografisnya 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan.

Dengan batas wilayah :

Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajenne

Selatan : Kabupaten Bone

Barat : Selat Makassar

Timur : Kabupaten Maros

Dengan beragam suku yang tinggal di sana, kota ini termasuk yang terbesar di Indonesia dalam hal perkembangan dan demografi. Di Kota Makassar, kelompok etnis utama meliputi Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa. Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara, dan Sop Konro adalah makanan khas Makassar.

Sungai Tallo mengalir ke bagian utara Kota Makassar, dan Sungai Jeneberang bermuara di bagian selatan kota. Kota Makassar merupakan lokasi pantai yang datar dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat ke arah barat. Kota Makassar memiliki luas daratan sekitar 175,77 km², 11 pulau di Selat Makassar, dan luas perairan sekitar 100 km². Ini memiliki populasi sekitar 1,25 juta. Total ada 14 kecamatan dan 143 kecamatan di Kota Makassar. Ada tujuh kecamatan yang diapit pantai ini: Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Secara umum topografi kota Makassar terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian barat ke utara relatif rendah dekat dengan pantai, sedangkan topografi relatif berbukit di bagian timur seperti di Desa Antang Kecamatan Panakkukang dimana kemiringan tanah antara 0 sampai 2 derajat (datar) dan 3 sampai 5 derajat (bergelombang). Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung bergerak ke arah timur kota, terbukti dengan aktifnya pembangunan perumahan di Kecamatan Tamalanrea, Panakkukang, dan beberapa kecamatan lain di bagian timur kota. Kota Makassar juga memiliki kondisi iklim

sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius.

Padahal, Makassar sudah memiliki pemerintahan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1918, J.E. Dambrink memimpin kota sebelum pensiun pada tahun 1931. G.H.J. Beikenkamp mengambil alih darinya pada tahun 1932. Selanjutnya, F.C. Van Lier bertugas dari tahun 1932 hingga 1933. Ch.H. Ter Laag memimpin dari tahun 1934 sampai 1934. J. Leewis memimpin dari tahun 1934 sampai 1936. Kemudian, dari tahun 1942 sampai 1945, pada masa penjajahan Jepang, B. Yamasaki menjabat sebagai mayor Makassar. Nadjamuddin Dg Malewa yang memimpin kota Makassar pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus sampai 11 September 1945, diikuti oleh H.F. Brune dan D.M. Van Swietene yang melakukan perjalanan pada tahun 1946. Adul Hamid Dg Magassing menjabat sebagai walikota Makassar pada tanggal 24 Desember 1946. Ia memimpin kota tersebut hingga 27 Desember 1949, dan digantikan oleh Salawati Daud yang memimpin hingga Agustus 1950.

Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah "*Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Dan Berwawasan Lingkungan*".

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang dibantu dengan peningkatan standar sarana, prasarana, dan kemampuan intelektual, mental, dan spiritual.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk menyediakan ruang hidup yang nyaman.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup adalah mendukung Pemda dalam melaksanakan prakarsa pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

dilimpahkan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Perkembangan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- Penyelenggaraan administrasi pelayanan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pengendalian, dan
- Pengawasan prakarsa dan kegiatan di bidang lingkungan hidup.

d. Sumber Perangkat Daerah

Berdasarkan data yang ada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, personalia dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2021 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak, dan Brigade Taman Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

- Brigade Taman : 344 Orang
- PNS : 163 Orang (Berdasarkan Pangkat dan Golongan)

Tabel 4.1 : Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan	Jumlah
Gol. IV	22 Orang
Gol. III	59 Orang
Gol. II	59 Orang
Gol. I	23 Orang

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Tabel 4.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	2 Orang
S1	70 Orang
D3	4 Orang
SMA	135 Orang
SMP	35 Orang
SD	76 Orang

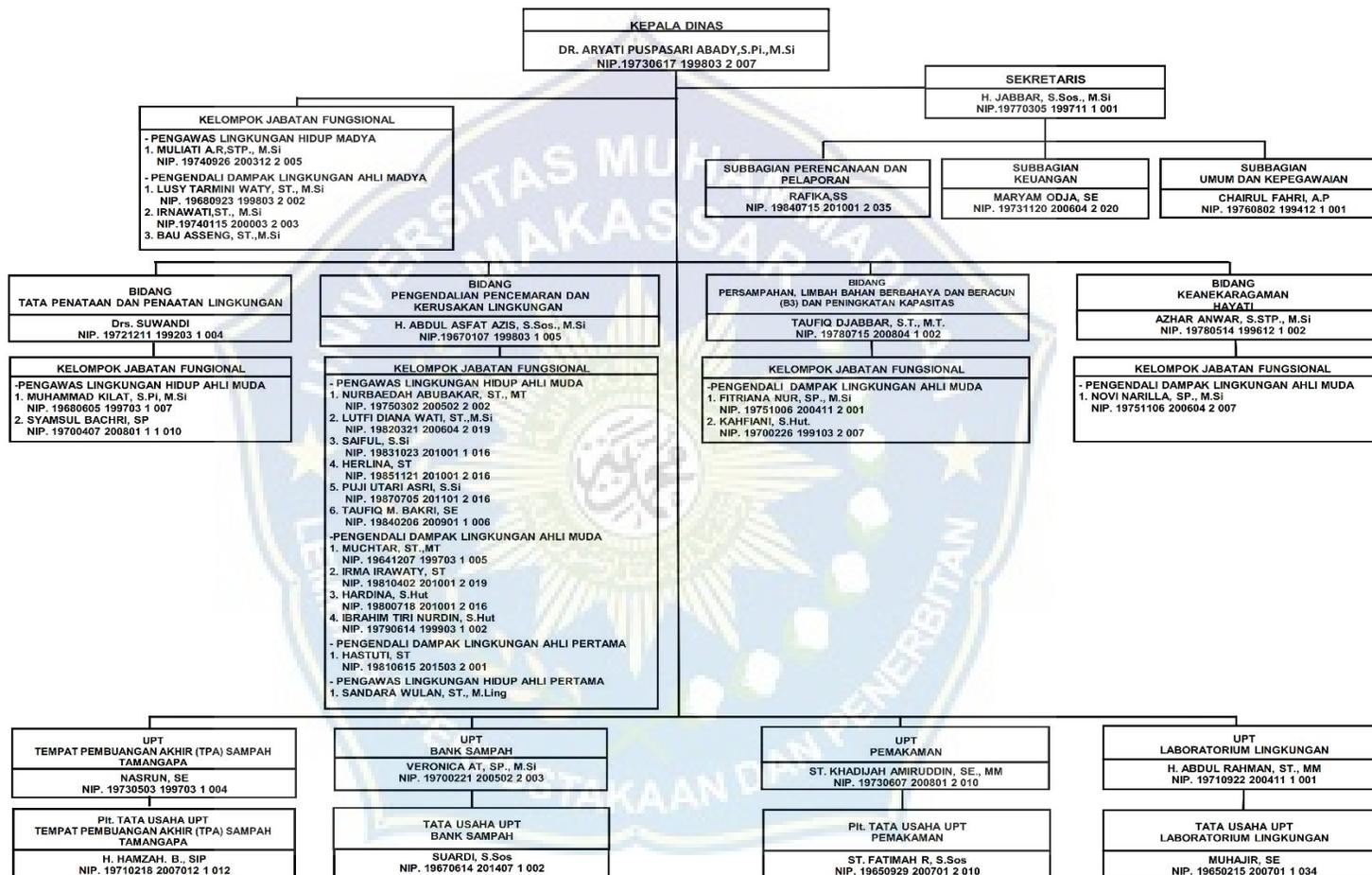
Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Tabel 4.3 Tenaga Kotrak

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	2 Orang
S2	26 Orang
S1	51 Orang
D3	1 Orang
SMA	56 Orang
SMP	9 Orang
SD	18 Orang

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022



Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

B. Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Masa Pandemi Kota Makassar

1. Target dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah

Isu implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah yang terlihat pada kota Makassar, masih sangat memerlukan penanganan yang maksimal, Permasalahan implementasi yang terlihat terletak padanya perbedaan antara motivasi pemerintah yang dituangkan dalam hukum atau peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kami menemukan inkonsistensi di lapangan meskipun pemerintah telah menetapkan standar pengelolaan sampah. Masalah ini berdampak signifikan terhadap ekosistem setempat karena kurangnya kesadaran, kelangkaan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah, dan tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA). (Diki, 2022).

Pada tahun 2030, mengurangi biaya per kapita dari dampak lingkungan, termasuk meberikan perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk pengolahan limbah perkotaan (Nurdin, 2021). Hanya ada satu tempat pembuangan akhir sampah di Makassar, yang terletak di Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan dengan penambahan penduduk yang pesat serta volume sampah yang meningkat, semakin semrawut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar kembali berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Mencermati Perda Nomor 4 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Sampah yang sudah berlaku bertahun-tahun namun baru dideskripsikan atau dilaporkan, maka implementasi dari kebijakan tersebut sebenarnya tidak dilakukan dengan cara yang sepihak. sesuai dengan fakta di lapangan.

Dinas Lingkungan Hidup memilih target dan tujuan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar mengacu perwali makassar tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bahwa Target pengurangan sampah dan penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Bahwa: (1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka tiimbulkan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampahnya rumah ttangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampaaah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025, dan (2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah seejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampaaah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

Untuk itu dalam menangani masalah pengelolaan sampah dalam hal ini agar tidak mengalami permasalahan yang lebih serius maka diperlukan untuk menganalisis mengapa ada isu Implementasi kebijakan yang terjadi, untuk itu

peneliti melakukan tinjauan literature sebagai berikut: (1) mengidentifikasi tujuan organisasi/Pencapaian Kinerja Organisasi, (2) Penyebab terjadinya kesenjangan, (3) Identifikasi solusi dalam mengatasi masalah kesenjangan.

a. Tujuan Organisasi/Pencapaian Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Langkah pertama dari proses analisis permasalahan ini adalah mengidentifikasi kinerja pelaksana berdasarkan tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu dan harus dicapai oleh individu atau tim. Dalam hal ini mengacu pada perda dan perwali kota makassar. Dimana organisasi tujuan harus cukup spesifik untuk memenuhi panduan harian dan cukup fleksibel untuk direfleksikan kondisi yang berubah. Tujuan yang dimaksud adalah dimana individu dan setiap anggota tim dalam pengelolaan sampah harus mampu menentukan tujuan kinerja mereka sendiri. Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman bagaimana pengelolaan sampah.

Kinerja pelaksana diukur dengan membandingkan hasil dengan tujuan yang ditetapkan untuk sistem pengelolaan sampah, yang mempertimbangkan faktor teknis, kelembagaan, keuangan, hukum, dan keterlibatan masyarakat. Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan tingkat pelayanan yang dapat diterima masyarakat dan kesenangan yang dirasakan masyarakat. Menurut standar yang ada seperti SNI T-13-1990-F

tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan dan SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman, indikator kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya adalah kondisi ideal sampah. manajemen sebagaimana ditentukan oleh studi literatur tentang sistem pengelolaan limbah. Selain itu, evaluasi kinerja dapat didasarkan pada perspektif atau pendapat masyarakat umum sebagai pengguna layanan sampah.

(Haryono, 2002) perhitungan dapat digunakan untuk menentukan apakah tujuan pengelolaan sampah telah berhasil dicapai dengan cara: 1) Perbandingan antara pengangkutan sampah dan volume timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan keadaan setempat dan kepadatan penduduk 2) Perbandingan antara daerah terlayani dengan daerah terlayani . 3) Jumlah orang yang dilayani harus disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur, kepegawaian, dan keuangan untuk pengelolaan sampah.

Tentu dalam hal ini kita membutuhkan persepsi masyarakat untuk melihat ukuran keberhasilan pengelolaan sampah, Jika kita menarik kesimpulan tentang persepsi, kinerja, dan pengelolaan sampah, kita dapat mengatakan bahwa pandangan seseorang atau masyarakat tentang kinerja pengelolaan sampah adalah penilaian mereka terhadap hasil atau tujuan yang diantisipasi dari berbagai kegiatan pengelolaan sampah. Perbedaan persepsi setiap orang secara signifikan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, pengetahuan, keterampilan pemusatan perhatian, kebutuhan, sistem nilai, dan fitur kepribadian mereka. Opini masyarakat terhadap kinerja pengelolaan

sampah akan dipengaruhi oleh bagaimana pandangan masing-masing individu terhadap kinerja tersebut. Variabel dan indikator kinerja pengelolaan sampah diperlukan untuk menilai kinerja pengelolaan sampah dari perspektif masyarakat.

Kinerja pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk pengelolaan sampah. Jika pengelolaan sampah Kota Makassar dibiarkan begitu saja, menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011, ada yang tidak berjalan sesuai rencana dan ada persoalan yang kentara. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini harus dapat menghubungi Ketua RW, RT, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di masing-masing Kelurahan di Kota Makassar dengan mensosialisasikan Perda Nomor 7 Tahun 2012. tetapi kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat Kecamatan di Kota Makassar mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan masyarakat juga seolah apriori terhadap permasalahan sampah ini karena walaupun sudah disosialisasikan dan bahkan ketua RT sudah mengingatkan, tetapi masyarakat tetap saja membuang sampahnya ke sembarangan yang pada akhirnya mengakibatkan timbulan sampah bertambah apalagi di masa pandemic Covid-19.

a. Target dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Seperti yang kita ketahui bahwa pengumpulan sampah sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau industri yang menghasilkan sampah. Untuk menampung sampah, mereka harus

membangun atau menyediakan tempat yang biasa disebut (TPS), dan setelah penuh, diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sistem mekanisme atau cara transportasi untuk kawasan metropolitan diurus oleh pemerintah daerah, dibantu dengan keterlibatan aktif pihak-pihak yang menghasilkan sampah. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk membiayai pengelolaan sampah. Sebaliknya, umumnya dapat ditangani oleh setiap rumah tangga di pedesaan tanpa membutuhkan TPS atau TPA.

Dalam hal ini Kota Makassar menjadi salah satu kota yang menghasilkan sampah terbanyak, yang mana secara spesifik dapat dikatakan bahwa sampah-sampah yang ada di Kota Makassar belum bisa diatasi dengan baik seperti dalam hal penerapan kebijakan pengelolaan sampah yaitu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam Hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Untuk itu Pemerintah Kota Makassar haru memiliki Target Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan target dalam Pengelolaan sampah di Kota Makasaar, Seperti Berikut:

“...Target untuk pengelolaan sampah terkait dengan 3R dikota makassar itu sebenarnya sudah diterapkan namun memang masih belum maksimal dimana disini target pengurangan sampah itu ada dalam perwali 36 tahun 2018 kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, khusus untuk kota makassar itu targetnya 30% pengurangan dan 70% penanganan. Pengurangan sampah itu dilakukan di sumber dihasilkannya sampah, misalnya suatu kegiatan usaha contohnya hotel pengurangannya itu

berupa tidak menggunakannya kembali botol minuman bekas dengan menggantikan air gallon merupakan salah satu bentuk pengurangan sampah...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa terkait dengan target pengelolaan sampah dengan cara 3R sudah dilakukan namun belum maksimal baik dalam pengurangan sampah di Kota Makassar telah di jalankan sesuai dengan perwali 36 tahun 2018 dimana target tersebut sebanyak 30% pengurangan dan 70% penanganan, yang artinya bahwa target tersebut harus di capai sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal.

Senada dengan yang dikemukakan pula oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Sebagai Berikut:

“ untuk target 3R itu sebenarnya kita mengharapkan agar bisa di terapkan dengan maksimal namun memang nyatanya sangatlah susah untuk menerrapkan target dari 3R itu di Kota Makassar, kita dari pihak DLH yang menerapkan tagert 30% pengurangan dan 70% penanganan itu sebenarnya di Kota Makassar sudah banyak pengusaha yang melakukannya hanya saja memang tidak semua masyarakat bisa ikut serta dalam penanganan sampah namun tahun ini kita berencana akan akan membuat aplikasi laporan terkait dengan pengurangan sampah...” (Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dilanjutkan lagi oleh Staff Dinas Lingkungan Hidup yang mengemukakan, Seperti Berikut:

“...target pengelolaan sampah dengan menggunakan 3R itu saya rasa tidak berjalan dengan baik dimana kita lihat dalam hal ini pengurangan sampah yaitu kami baru saja melakukan di lorong wisata, peran DLH dalam program ini itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang

pengelolaan sampah, utamanya pengelolaan sampah organik. Sampah organik rumah tangga ini kan persentasenya lebih tinggi dalam komposisi sampah, sampah organik kota Makassar itu mencapai 50%, untuk itu edukasi DLH itu bagaimana sampah organik ini dapat diolah menggunakan maggot (ulat maggot) sudah ada di TPS 3R Untia, dan di Pacarana BTP. Maggot itu dapat mengurai sampah organik dengan cepat, ini merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pihak DLH yang dapat bantuan langsung dari Korea yang moderat tempat maggotnya yang dihibahkan ke kota Makassar kemarin kita. Pihak DLH mengharapkan kegiatan ini dapat diterapkan dimasyarakat sehingga sampah organik tidak sampai lagi ke TPA cukup sampai di Rumah tangga saaja, manfaat dari maggot ini juga bisa jadi pakan ternak, bisa jadi minyak maggot, tepung maggot. Di Untia masih sederhana namun yang di paccerakan sudah modern yang dihibah dari Korea...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dengan menganalisis keseluruhan hasil observasi dan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam menetapkan target pengelolaan sampah dengan menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Makassar belum diterapkan dengan maksimal dalam artian berjalan namun tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar yaitu Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan target dimana 30% pengurangan dan 70% penanganan. Dan juga melakukan target lainnya yaitu ingin tahun ini akan membuat aplikasi laporan terkait dengan banyaknya sampah yang ditangani sehingga memudahkan pemerintah kota untuk mengetahui banyaknya sampah yang ditangani setiap bulannya, selain itu juga Dinas Lingkungan membuat Target untuk melestarikan ulat maggot karena diyakini bahwa ulat maggot ini bisa digunakan untuk mengurangi sampah

organik dengan cepat. Jadi dapat dipastikan bahwa dalam hal Target pengelolaan sampah di Kota Makassar telah berjalan.

Langkah selanjutnya adalah mengukur apakah target yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berjalan dengan maksimal atau tidak, untuk itu tentu dibutuhkan measurable ini dalam melihat bagaimana target Pemerintah Kota Makassar, terlebih lagi pada saat masa new normal saat ini.

Tentu untuk mengukur target dari implementasi ini kita harus melihat dari berbagai sisi dalam pemerintah dan masyarakat. Guna dari adanya measurable ini yaitu untuk melihat dan menentukan langkah selanjutnya dari fakta-fakta yang sudah ada dimana goals/ tujuan untuk menerapkan metode pengelolaan sampah yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus diukur untuk memperlihatkan progres ke tujuan yang ingin di capai oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Penanganan sampah.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan melihat ukuran dalam penanganan sampah di Kota Makasaar, Seperti Berikut:

“...saya rasa setiap tahun target pengelolaan 3R itu tidak tercapai karena itu tadi kendalanya juga kita kesulitan untuk mendapatkan datanya, masyarakat yang masih kurang mengerti apa itu 3R dan bagaimana mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, dan juga sebenarnya jika dilihat dari pemulung-pemulung yang ada di TPA itu membantu kami dalam hal pengurangan sampah karena dia memisahkan sampah-sampah yang bernilai ekonomis untuk di TPA untuk di ambil lalu dijual,

namun sebenarnya dalam regulasi itu kan tidak boleh, kita juga sering mengingatkan kepada masyarakat untuk melarang namun tidak dilakukan karena itu sumber penghasilan mereka dari situ. Kalau terkait sapi itu kita sudah berapa kali mengatakan kepada masyarakat namun kita hanya mendapatkan jawaban kita lebih dulu disini, sehingga sangat berat untuk diatasi...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa ukuran target 3R yang telah diterapkan dalam hal penanganan sampah di Kota Makassar itu tidak tercapai setiap tahunnya, dikarenakan kebanyakan kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup, salah satunya masih banyak masyarakat yang tidak memahami metode 3R tersebut, dan juga masyarakat untuk memulung dan ternak sapi serta merasa bahwa TPA itu adalah tanah milik mereka sendiri sehingga Pihak Dinas Lingkungan Hidup kesusahan dalam mengatasinya.

Senada dengan yang di kemukakan oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Seperti Berikut:

“...sebenarnya yang mejadi masalah disini dalam penerapan 3R itu karena memang masih sangat banyak orang yang awam dengan istilah tersebut, salah satunya ya masyarakat dimana masyarakat sendiri tidak akan paham apa itu 3R, mengapa harus ada 3R, selain memang kurangnya pemahaman masyarakat terkait itu juga di luar dari itu masyarakat memang masa bodoh terkait dengan sampah sehingga saya rasa untuk menerapkan 3R ini di Kota Makassar memang di perlukan sosialisasi yang teratur kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengerti bahwa sebenarnya sampah bisa memiliki nilai ekonomi...” (Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dilanjutkan dengan bagaimana penanganan dan pencapaian target di masa Pandemi covid-19. Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Seperti Berikut:

“...terlebih lagi pada saat masa covid-19 saya lihat bahwa sulitnya menerapkan 3R itu dilihat dari yang awalnya bank sampah lumayan banyak yang aktif sekitar 500an namun setelah covid-19 ini banyak yang tidak melakukan pemilahan dengan alasan takut, termasuk TPS 3R Darulaman yang sebelumnya sangat aktif dalam pemilahan sampah namun pas covid-19 dia vakum/stop dari tahun 2020 namun mulai aktif kembali 2021 tapi tidak seperti dulu lagi atau dengan kata lain dalam pemilihannya terbatas dengan alasan takut terhadap Covid-19, sehingga bisa dikatakan bahwa target penanganan sampah ya semakin tidak maksimal...” (Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa untuk melihat ukuran target terkait dengan 3R yang telah ditetapkan itu cukup kesulitan karena masih sangat banyak masyarakat yang tidak memahami apa sebenarnya 3R dan pola pikir masyarakat yang masih acuh tak acuh terkait dengan sampah, yang pada akhirnya mengakibatkan target penanganan sampah tidak tercapai setiap tahunnya, terlebih lagi pada saat masa pandemi covid-19, dimana banyak bank-bank sampah yang tidak beroperasi sehingga mengakibatkan target dalam penanganan sampah lebih tidak maksimal.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan penanganan sampah Kota Makassar, Ibu K seperti Berikut:

“...meskipun saya sering memulung di lahan TPA ini, tapi saya tidak tahu bagaimana target 3R yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam

penanganan sampah di Kota Makassar, karena kita tidak tahu jadi kita hanya memulung disini tapi saya rasa targetnya belum tercapai karena kita lihat sampah disini sudah sangat banyak, dan susah untuk ditangani lagi...” (Wawancara K 8 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa target yang ingin di capai oleh pemerintah dalam penanganan sampah di Kota Makassar dengan menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) itu masyarakat sama sakali tidak tahu sehingga masyarakat tidak bisa membantu pemerintah dalam mencapai target tersebut yang mengakibatkan masyarakat seperti lepas tangan dalam penanganan sampah di Kota Makassar.

Dalam menentukan target dan melakukannya kita melihat apakah target tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jika kita melihat dari target pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar dimana 30% pengurangan dan 70% penanganan maka tentu itu harus tercapai, ketika target yang di tentukan tidak maksimal maka tentu dibutuhkan evaluasi terhadap apa yang menjadi kendala dari kesenjangan tersebut. Target pengurangan dan penanganan sampah yang dimaksud adalah 3R Pembatasan (*reduce*), Guna-ulang (*reuse*) dan Daur-ulang (*recycle*).

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan tercapainya target dalam 3R terhadap penanganan dan pengurangan sampah di Kota Makasaar, Seperti Berikut:

“...jika kita kembali melihat bagaimana keadaan sampah di Kota Makassar ini tentu kita pasti akan bisa langsung menilai bagaimana sebenarnya penanganan sampah di kota Makassar, mengapa sampah-sampah tidak diolah dengan baik, tentu sudah bisa menjawab bahwa memang penerapan target pengelolaan sampah dengan 3R itu belum tercapai dengan maksimal di kota Makassar, dimana masih banyak sekali hal-hal yang harus di perbaiki, baik itu dalam pola pikir masyarakat, maupun juga perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang notabennya juga menghasilkan sampah yang banyak, itu memang masih sangat memerlukan penanganan yang lebih tepat lagi...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa untuk untuk pencapaian 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar memang masih sangat memerlukan perhatian yang lebih, dimana nyatanya masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan 3R tersebut sehingga sulit untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan akhirnya penanganan sampah di Kota Makassar tidak pernah maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kebijakan.

Senada dengan yang di kemukakan oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Seperti Berikut:

“...seperti yang saya katakan tadi bahwa memang untuk 3R ini kita tentu perlu melakukan edukasi, tapi terlepas dari itu saya rasa mengapa 3R ini tidak berjalan dengan maksimal juga bukan hanya karena masyarakat yang tidak menerapkannya dengan baik namun juga dalam hal sarana dan prasarannya yang memang masih kurang memadai juga sehingga bisa di katakan bahwa masih sangat sulit untuk menerapkan 3R tersebut di Kota Makassar apalagi pada saat masa pandemi covid 19 ini itu terjadi pengurangan anggaran yang otomatis juga membuat kegiatan-kegiatan

yang akan dilakukan di masyarakat mengalami kendala ...”
(Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam hal menerapkan 3R di Kota Makassar itu bukan hanya karena banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan 3R tersebut dalam pengelolaan sampah namun juga terkait dengan sarana dan prasarana yang mengakibatkan pengelolaan sampah dengan metode 3R ini tidak berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah di Kota Makassar

Dilanjutkan lagi oleh Staff TPA Tamangapa yang mengemukakan, Seperti Berikut:

“...saya rasa untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ini masih sangat kurang, apalagi banyak jumlah mobil yang rusak ditambah banyak kendaraan pengangkut sampah yang sudah tua dan sering rusak sehingga pelayanan pengangkutan sampah pun mengalami hambatan...” (Wawancara dengan HZ 7 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Makassar masih mengalami hambatan dalam hal sarana dan prasarana sehingga tidak memaksimalkan penanganan sampah secara maksimal. Berikut gambaran sarana dan prasarana Persampahan di Kota Makassar Tahun 2020:

Table 4.4
Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Makassar Tahun 2022

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL																					
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022																					
No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kebersihan	Roda 3 (Fukuda) (Unit)		Dump Truck/Arm Roll Besar (Kap. >10 m3) (Unit)		Dump Truck/ Terbuka (Kap. 6-8 m3) (Unit)		Truck/ Tertutup (Tangkalasaki) (Unit)		Arm Roll Truck (Unit)		Compactor (Unit)		Gerobak Sampah (Unit)		Kontainer (Unit)		Keterangan		
			KONDISI																		
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Biringkanaya	324	83	6	0	0	13	0	24	1	8	0	0	0	0	0	12	0			
2	Bontoala	217	54	0	0	0	8	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0			
3	Kep. Sangkarrang		6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	12					
4	Makassar		74	5	0	0	10	0	15	0	2	0	1	0	10	0	0	0			
5	Mamajang	226	62	4	0	0	11	0	7	1	5	0	0	0	0	0	3	0			
6	Manggala	272	85	5	0	0	10	2	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0			
7	Mariso		51	0	0	0	9	0	9	0	1	0	1	0	0	0	3	0			
8	Panakkukang	354	88	0	0	0	20	0	17	0	13	0	0	0	0	0	12	0			
9	Rappocini	331	109	0	0	0	9	0	14	0	5	1	0	0	0	0	0	0			
10	Tallo		78	4	0	0	9	1	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0			
11	Tamalanrea	295	75	0	0	0	10	1	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
12	Tamalate	319	102	0	2	0	9	0	14	0	9	0	1	0	0	0	6	0			
13	Ujung Pandang		55	0	1	0	14	0	13	0	4	0	1	0	0	0	4	0			
14	Ujung Tanah	168	48	0	0	0	6	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0			
15	Wajo		34	0	0	0	9	2	8	0	3	0	1	0	0	0	3	0			
Total			1,004	32	3	0	147	6	188	2	66	1	5	0	48	12	43	0			
Jumlah Total			1,036	3	3	0	153	6	190	2	67	1	5	0	60	12	43	0			
Pertimbangan khusus untuk kecamatan sabtu bersih Sampah istimewa Makassar sediakan 1 mobil hari sabtu																					

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

b. Eksistensi yang Terlaksana dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Dalam penentuan target tentu dibutuhkan sebuah kesesuaian atau eksistensi dimana hal ini yang akan menjadi acuan apakah target yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sudah bisa menjadi metode yang dapat mengurangi sampah di Kota Makassar.

Seperti yang diketahui bahwa penerapan sampah dengan menggunakan 3R ini dapat menjadi solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain dari kesadaran masyarakat yang memang sangat penting, pihak pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar terkait dengan metode 3R ini.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan tercapainya target dalam 3R terhadap penanganan dan pengurangan sampah di Kota Makassar, Seperti Berikut:

“...jika kita berbicara tentang kesesuaian pasti belum sesuai ya apa yang menjadi target kita dari Dinas Lingkungan Hidup dengan yang terjadi dilapangan, dimana ya itu tadi masih banyak sekali masyarakat yang masa bodoh perihal sampah, sehingga kita juga kesusahan untuk bagaimana mengeusaiakan kebijakan ini dengan cara pandang masyarakat, kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam penanganan sampah, membuat target-target baru namun memang ya berjalan seadanya saja sehingga memang kita dari pihak DLH juga kesusahan dalam hal ini, sering kali pun kita juga kesusahan dalam mendapatkan data dari penanganan sampah yang akhirnya juga

berimbas lagi pada proses penanganan sampah itu sendiri...”
(Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa untuk kesesuaian dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan metode 3R dirasa masih sangat belum sesuai karena buktinya masih banyak sampah dan metode ini belum maksimal di terapkan di masyarakat, sehingga sampah-sampah belum teratasi dengan baik, selain itu juga pihak DLH masih selalu kesusahan mendapatkan data-data pengelolaan sampah di Kota Makassar sehingga sudah bisa di pastikan bisa mempengaruhi penerapan metode 3R .

Senada dengan yang di kemukakan oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Seperti Berikut:

“...kesesuaian target itu menurut saya susah untuk dikatakan sesuai karena nyatanya sampai sekarang sampah di Kota Makassar masih sulit untuk diatasi, jujur saja kita dari Pihak DLH yang memang hanya sebagai regulator ya hanya memantau bagaimana masuknya sampah di TPA. Untuk 3R itu sendiri saya rasa sudah berjalanya kita lihat Bank Sampah yang memang menjadi salah satu alternatif dalam 3R itu ada atpi memang dalam pengimplementasiannya ke lingkungan itu masih sangat minim, sehingga bisa dikatakan bahwa memang masih memerlukan perhatian baik itu dari masyarakat maupun juga dari semua pihak yang terlibat...” (Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam penanganan sampah dengan metode 3R itu

belum sesuai untuk itu diperlukan perhatian yang lebih, sehingga masyarakat dan pemerintah bisa lebih mengatasi peningkatan sampah di Kota Makassar.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan penanganan sampah di Kota Makassar, Ibu K seperti Berikut:

“...kalau kita masyarakat hanya mengikuti arahan dari pemerintah namun sampai sekarang kita belum paham dengan baik arahan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, jadi kita tidak paham hal-hal apa yang harus dilakukan, kalau seperti sosialisasi saya rasa itu sangat jarang dilakukan oleh pemerintah bahkan saya belum pernah ikut sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa..” (Wawancara K 8 Desember 2022)

Dipertegas dengan wawancara yang dilakukan dengan Staff TPA Tamangapa yang mengemukakan bahwa:

“...saya rasa sosialisasi pertahun 2020 itu stop karena bapada menganggap bahwa tidak ada perubahan yang dirasakan, karena kecamatan yang melakukan sosialisasi yang di undang hanya itu-itu saja, karena mereka menganggap bahwa kalau kita pergi jadi peserta ada uang-uang jalan, namun jika kita melihat keinginan pemerintah yang diundang untuk peserta sosialisasi adalah orang-orang yang mampu menyumbang lidahnya pemerintah ke masyarakat dalam hal memberitahukan masyarakat bagaimana cara mengelolah sampah. Jadi dapat di katakana bahwa sosialisasi pengelolaan sampah di kota makassar tidak membawah pengaruh yang signifikan. Sekarang ini kita juga menganggarkan sosialisasi dengan cara door to door, dimana didalam suatu lorong wisata itu dilakukan sosialisasi terkait dengan pengelolan sampah...” (Wawancara dengan HZ 7 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa kesesuaian penerapan 3R memang belum maksimal dilakukan di Kota Makassar, karena buktinya masih banyak sekali masyarakat

yang tidak tahu apa itu 3R dan bagaimana manfaat dari 3R tersebut, tidak adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat karena di rasakan bahwa sosialisasi tidak membawah pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) tentu dibutuhkan ketentuan waktu dalam penerapannya agar bisa lebih maksimal. Untuk itu dibutuhkan timebound dalam melihat apakah pengelolaan sampah di Kota Makassar dengan menggunakan Metode 3R tersebut telah terlaksana sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditetapkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan persampahan terdiri atas pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan yang masing-masing sistem sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar. Dengan adanya ketepatan waktu dalam pengangkutan sampah tentu akan membuat pengelolaan sampah akan lebih maksimal.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan tercapainya target dalam 3R terhadap penanganan dan pengurangan sampah di Kota Makasaar, Seperti Berikut:

“...kalau terkait pengangkutan sampah itu kita usahakan untuk selalu melakukannya karena dengan begitu sampah-sampah akan diolah dengan baik, namun memang masih ada sebagian masyarakat yang selalu sadar diri bahwa sampah ini sudah mau di angkut yang mengakibatkan sampah-sampah tersebut tertumpuk lagi karena mereka membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,

sehingga bisa dipastikan bahwa kesadaran masyarakat terkait sampah memang masih sangat kurang...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang bermukim di Kota Makassar, Ibu M mengemukakan bahwa :

“...Sikap pekerja dalam mengangkut sampah sudah baik dan sesuai tanggung jawab pekerjaannya, hanya saja waktu pengangkutan sampah disekitar lingkungan rumah kami sudah jarang beroperasi sehingga sampah kadang tinggal menumpuk...” (Wawancara M 8 Desember 2022)

Dilanjut dengan pernyataan Ibu Ki bahwa:

“...Kadang sikap pekerja yang mengangkut sampah suka marah-marah dan mengomel apabila terlalu banyak sampah dan cara mengangkut sampahnya asal angkut tidak peduli ada sebagian sampahnya yang jatuh berserakan. Mereka harusnya sadar kalau itu sudah menjadi tugas mereka mengangkut sampah kami...” (Wawancara Ki 8 Desember 2022)

Adapun menurut Ibu A mengungkapkan bahwa :

“....biasanya itu satu kali seminggu ada mobil pengangkut sampah yang datang untuk mengangkut sampah disekitar perumahan disini jadi menurut saya perilakunya kalau keadaannya seperti ini mereka mungkin yang malas untuk menjalankan tugasnya setiap hari...” (Wawancara A 8 Desember 2022)

Selanjutnya menurut Ibu R menyatakan bahwa :

“...Perilaku pekerja/tukang sampah kalau mengangkut sampah itu ada yang sering marah-marah apalagi kalau sampahnya banyak. Saya rasa mereka tidak sadar kalau itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pengangkut sampah...”(Wawancara R 8 Desember 2022)

Dan Menurut Ibu An menyatakan bahwa :

“...Ada sebagian pekerjaanya itu yang mengangkut sampah pasti marah-marah kalau sampah terlalu banyak menumpuk padahal sampah itu juga menumpuk karena diangkut hanya tiga kali seminggu sementara tiap hari selalu ada sampah yang dihasilkan dan kadang sampah yang diangkut itu juga banyak yang jatuh dan biasa mereka biarkan berserakan saja...” (Wawancara An 8 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa dari batas waktu atau ketentuan waktu yang dibuat dalam pengangkutan sampah di Kota Makassar masih menjadi salah satu faktor yang sering terjadi dimana pemerintah sendiri telah menyediakan truk pengangkutan sampah namun masih bisa tidak tepat waktu dalam pengangkutan sampah sehingga banyak masyarakat yang pada akhirnya juga berpendapatan bahwa pengangkutan sampah tidak berjalan dengan baik, dan dibalik itu juga terkadang masyarakat juga tidak melihat jadwal pengangkutan sampah sehingga pada akhirnya sampah tidak di angkut dan mengakibatkan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah tersebut bertambah, yang mana ini bisa disimpulkan bahwa terkait dengan ketentuan waktu yang ditetapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar belum maksimal dilakukan baik dari sisi pengangkutan sampah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Langkah ini untuk identifikasi persepsi anggota tim tentang perbedaan antara tujuan kinerja mereka dan kinerja aktual. Dan melihat ukuran besar kesenjangan yang dialami sehingga dikatakan adanya Kesenjangan Implementasi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Jika Ditinjau Dari Visi Misi dari Pengelolah Sampah Dinas Lingkungan Hidup yaitu ingin Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana, Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nyatanya ini memang masih sangat jauh dari yang diharapkan, dimana volume sampah yang di hasilkan itu jumlahnya semakin meningkat drastis tiap tahun dan tidak didukung oleh kondisi TPA yang memadai baik dari sistem pengelolaan maupun infrastrukturnya.

Mengatasi masalah sampah kota, yang diberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk diselesaikan dengan solusi kreatif. Gagasan yang dilontarkan, khususnya “oleh, dari, dan untuk masyarakat” dapat menjadi landasan bagaimana individu berperilaku terhadap sampah. Sejauh yang diketahui, pemerintah dan masyarakat telah bersama-sama membayar sampah yang dihasilkan masyarakat selama ini.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai pemain utama dalam pengelolaan sampah, upaya telah dilakukan untuk mencoba dan mengurangi

timbulan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup berupaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan gagasan 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pembuatan program, sebagaimana tertuang dalam Permen No. 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Melalui Mekanisme Bank Sampah .

Seperti yang sudah menjadi rahasia umum, pengelolaan sampah mengacu pada rencana pengaturan timbulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah. (Effendy et al., 2018) Mengatur dan meningkatkan operasi pembuangan sampah adalah salah satu hal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah kota. Pemandahan sampah melibatkan penempatan sampah yang terkumpul di dalam kendaraan untuk diangkut ke lokasi pembuangan akhir. (Fatoni et al., 2017). Pemilihan rute pengiriman sampah akan berdampak pada biaya operasional kendaraan, termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi. Namun terkait dengan persoalan pengelolaan sampah di Kota Makassar, fasilitas pengangkutan sampah dalam beberapa kantong diklaim masih mengalami kendala karena masih kurangnya penempatan sampah yang masih belum menjangkau gang-gang sempit. menyebabkan perluasan sampah di gang-gang sempit.

Namun diketui Pemerintah Kota Makassar tengah menerapkan program lorong Makassar untuk mengatasi masalah sampah yang tidak dapat dijangkau yang adanya program maggot, Maggot itu sendiri merupakan hewan yang rakus dalam hal makan dengan pakan maggot berupa sampah organik

dapat mencapai 1 kg satu hari. Pakan maggot ini sangat mudah didapatkan dan harganya pun relative murah sekali sehingga potensi keuntungannya pun bisa terus meningkat, yang kedua itu program longwish, dimana Pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan program minyak jelanta yang merupakan sisa-sisa penggorengan dari masyarakat yang selama ini di buang di selokan, untuk itu Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sisa-sisa Minyak tersebut dalam satu wadah yang nantinya akan dijadikan atau ditukarkan dengan minyak baru atau dijadikan rupiah, dimana satu liter paling murah 5ribu rupiah, dimana minimal bank sampahnya disini mengumpulkan minyak jalanta dari masyarakat. Program ketiga yang ditawarkan pada program lorong wisata yaitu bagaimana melakukan Eco Enzyme yaitu adanya fermentasi kulit-kulit buah selama 3 bulan, yang memiliki banyak manfaat. Untuk saat ini memang masih baru dilakukan di lorong-lorong wisata belum secara keseluruhan namun tiap tahun dilakukan dan terus akan berlanjut terus setiap tahun.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan ukuran kesenjangan dalam Pengelolaan sampah di Kota Makasaar, Seperti Berikut:

“...kita Dinas Lingkungan hidup disini hanya sebagai regulator, dalam artian pihak DLH hanya mengatur regulasi-regulasi pengelolaan sampah, adapun masalah pengangkutan dari sumber ke TPA itu telah dilimpahkan kepada kecamatan masing-masing, dikatakan dalam perwalinya nomor 3 tahun 2015 bahwa terkait pelimpahan kewenangan pengangkutan

sampah dan retribusi, disini khusus DLH itu hanya menangani bagian pemrosesan akhir di TPA (Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup). Namun nyatanya memang masih sangat banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan penanganan sampah dengan baik sehingga pada akhirnya kesenjangan dalam pengelolaan sampah itu terjadi, terlebih lagi pada saat pandemi covid itu tadi banyak akhirnya bank-bank sampah yang tidak berjalan sehingga penanganan sampah pun tidak maksimal...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam penanganan sampah di Kota Makassar itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab DLH dimana sekarang telah dilimpahkan sepenuhnya kepada masing-masing kecamatan, dimana tiap kecamatan ini memiliki bank sampah namun hanya saja masih sangat banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam penanganan sampah terlebih lagi pada saat pandemi covid-19 di Kota Makassar.

Senada dengan yang dikemukakan oleh staff TPA Tamangapa Kota Makassar, sebagai berikut:

“...sebenarnya untuk masalah kesenjangan pasti kita tahu bahwa ini akan terjadi karena untuk pengelolaan sampah pun kita juga harus melibatkan masyarakat tapi sejauh ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kita sudah melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan namun tetap susah, untuk kesenjangan sendiri yaitu tadi harus merubah mindset masyarakat kelas atas yang terkadang untuk memilah sampah dirumahnya itu agak susah apalagi di saat pandemi covid-19 kemarin itu banyak sekali masyarakat yang akhirnya tidak ikut serta dalam pengurangan sampah...” (Wawancara dengan HZ 7 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa akibat dari kesenjangan ini adalah sulitnya mengubah mindset masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang tidak memahami terkait dengan bagaimana melakukan penanganan sampah, sudah di lakukan sosialisasi namun masyarakat masih tetap saja tidak mengerti, terlebih lagi disaat masa pandemi covid-19.

Seperti yang kita ketahui bahwa Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar adalah Dinas Lingkungan Hidup, di mana untuk kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Daur Ulang Sampah (Bank Sampah Pusat) Kota Makassar. Salah satu tugas pokok UPT Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengelolaan daur ulang sampah dengan melakukan pembelian sampah daur ulang di Bank Sampah Unit yang keberadaannya tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kalau melihat jumlah Bank Sampah Unit dan jika semuanya aktif, maka dapat diperkirakan besarnya potensi sampah yang bisa dikumpulkan oleh UPTD Bank Sampah Pusat. Namun Berdasarkan penelusuran data sekunder diperoleh data yang sangat jauh dari target sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.5 Data Reduksi Bank Sampah Pusat

Tahun	Reduksi Bank Sampah Pusat (kg)
2016	1.012.684
2017	1.287.141
2018	958.871
2019	883.363
2020	573.587
2021	481.426
2022 (s/d Juli)	262.841

Sumber : Bank Sampah Pusat Kota Makassar

Berdasarkan table dan grafik diatas terlihat bahwa kinerja pelaksana UPTD dalam pengelolaan sampah belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Kota Makassar. berdasarkan penelitian rata-rata produksi sampah/orang/hari adalah 0.7% (Laura Indrayani & Lestanto, 2015). Jika jumlah penduduk kota makasaar 1.427.619 jiwa dikali dengan 0,7 kg/hari maka idealnya jumlah sampah yang masuk adalah 999.333.300 Kg/Hari yang mana Jumlah tersebut tidak sesuai dengan hasil yang dicapai di UPTD bank sampah pusat. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kacamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	28.903	28.691	57.594
Mamajung	27.520	28.536	56.056
Tamalate	90.757	90.776	181.533
Rappocini	70.802	73.817	144.619
Makassar	40.699	41.443	82.142
Ujung Pandang	11.895	12.631	24.526
Wajo	15.002	15.031	30.033
Bontoala	27.339	27.763	55.102
Ujung Tanah	17.995	17.952	35.947
Kepulauan Sangkarang	7.051	7.136	14.187
Tallo	70.027	72.111	145.400
Panakukang	75.693	69.942	139.635
Manggala	74.393	73.900	147.549
Biringkanaya	110.318	105.079	210.076
Tamalanrea	59.310	51.805	103.220
Jumlah	770.709	716.613	1.427.619

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, jika diasumsikan bahwa setiap orang perhari menghasilkan sampah 0.7 Kg maka jumlah sampah yang dihasilkan perhari adalah 999.333.300 Kg atau 9.333 ton/hari dikalikan satu tahun (365 hari) maka 270.00.000 ton sampah/tahun. Jika dilihat dari nilai Ideal reduksi pengelolaan sampah sebanyak 30% maka total sampah pertahun sebanyak 81.000.000 ton sampah/tahun, namun nyatanya sampah yang di reduksi oleh UPTD Kota Makassar hanya 646.125,333 kg atau 73.500 ton/pertahun, yang mana ini masih sangat jauh dari target nilai ideal reduksi pengelolaan sampah.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat ditingkatkan melalui karakteristik pengusaha di kalangan generasi z ini, antara lain : membentuk Entrepreneurship Center (baik institusi kampus ataupun berupa organisasi kemahasiswaan), kerjasama dengan dunia usaha, membentuk unit usaha, kerjasama dengan institusi perbankan, dan Entrepreneurship Award sebagai pemicu semangat kewirusahaan dari mahasiswa, (Bahri & Arda, 2019). Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan untuk mencegah dampak yang ditimbulkan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah merubah pola produksi dan konsumsi yang tidak seimbang (unsustainable). Hal ini secara tidak langsung memerlukan sebuah konsep manajemen siklus hidup yang terpadu, yang menunjukkan sebuah kesempatan untuk menggabungkan pembangunan dengan perlindungan terhadap lingkungan, (Rahardyan & Widagdo, 2015). Jadi kerangka tindakan seharusnya ditentukan berdasarkan hirarki dari tujuan dan terfokus pada 4 program yang terkait dengan sampah, yaitu : a) Mengurangi jumlah sampah (minimising waste), b) Meningkatkan penggunaan kembali sampah dan daur ulang yang berwawasan lingkungan, c) Mempromosikan TPA dan tempat pengolahan yang berwawasan lingkungan. d) Memperluas jangkauan pelayanan sampah.

Empat program diatas adalah berkaitan dan harus saling mendukung dan terpadu untuk menghasilkan suatu kerangka yang komprehensif dan

responsif terhadap lingkungan dalam pengelolaan sampah kota. Demikian juga sektor swasta dan kelompok masyarakat ikut dilibatkan dalam implementasi program tersebut, (Syafrudin, 2014).

Namun nyatanya pengelolaan sampah di Kota Makassar masih mengalami tetap mengalami kesenjangan. Berikut ini hasil observasi dan wawancara ke masyarakat terkait dengan penanganan sampah di Kota Makassar, sebagai berikut:

“...iya kalau dalam hal penanganan sampah saya lihat pemerintah sudah cukup baik ya dalam menanganinya, karena kita disini pengangkutan sampahnya itu dibayar tiap bulan, jadi otomatis ada truk-truk terus yang mengambil sampah, hanya saja memang tidak semua masyarakat mau membayar, terkadang juga kita masyarakat merasa berat akan hal itu tapi mau bagaimana lagi...” (Wawancara A 8 Desember 2022)

Dari hasil obervasi dan wawancara diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa ukuran kesenjangan pengelolaan sampah di Kota Makassar benar-benar belum bisa untuk diatasi dimana masih banyak sekali hal-hal yang bersimpangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan pola pikir masyarakat yang ada di Kota Makassar dalam hal penanganan sampah.

2. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Pengelolaan Sampah

Tentu jika terjadi kesenjangan pasti ada penyebabnya, terlihat bukan hanya dari pemerintah namun juga peran dari masyarakat. Karena untuk menangani sampah peran masyarakat sangatlah berpengaruh. Proses

keterlibatan publik di sektor persampahan memungkinkan individu berdampak pada standar dan efisiensi infrastruktur yang disediakan bagi mereka sebagai individu dan sebagai masyarakat. Namun memang nyatanya masih banyak hal-hal dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sampah.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan ukuran kesenjangan dalam Pengelolaan sampah di Kota Makassar, Seperti Berikut:

“...saya rasa yang menjadi penyebab pengelolaan sampah mengalami kesenjangan ya itu tadi kita susah untuk mengubah mindset masyarakat, padahal disini masyarakat itu dia lebih ke pengurangan sampah, sedangkan dalam penanganan sampah itu dari pemerintah kota, jadi sangat penting peran masyarakat ini dalam pengelolaan sampah karena sebenarnya yang susah dalam pengelolaan sampah ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota tetapi menjadi tanggung jawab bersama entah itu peran masyarakat bagaimana ia memilah sampahnya dari sumber supaya ketika masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah itu, sampah-sampah yang bernilai ekonomis tidak sampai ke TPA...”
(Wawancara dengan M.NA 23 Agustus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga sangat diperlukan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Senada dengan yang di kemukakan oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Seperti Berikut:

“...sebenarnya pengelolaan sampah itu tidak sulit jika memang kita semua paham terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang benar, namun memang masih masyarakat di Kota Makassar ini ya begitu susah untuk menerapkan, terlebih lagi perusahaan dan pengusaha yang menghasilkan sampah kita biasanya kesulitan dapat datanya, sehingga tidak tahu sampah-sampah yang di kelola itu bagaimana...” (Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan pemerintah kota merasa bahwa masyarakat susah untuk mengerti bagaimana penanganan sampah yang baik, serta perusahaan dan pengusaha yang kebanyakan tidak memberikan data pengolahan sampahnya.

Senada dengan yang dikemukakan oleh staff TPA Tamangapa Kota Makassar, sebagai berikut:

“...kalau menurut saya sebenarnya disini itu ya kita semua perlu kesadaran diri saja kenapa kesenjangan pengelolaan sampah itu terjadi, karena ya itu banyak faktor yang memang tidak berjalan dengan baik, baik itu dari manajemen pengelolaan sampah atau bahkan dari masyarakat itu sendiri, dimana saat susah untuk mengubah pola pikir masyarakat, karena tidak semua masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah, seperti masyarakat kelas atas contohnya, dan saya rasa hal ini terjadi karena memang masyarakat tidak di berikan sanksi apapun kalau membuang sampah sembarangan jadi masyarakat ya semakin malas tahu dan tidak mau pusing perihal sampah...” (Wawancara dengan HZ 7 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa penyebab lain dari kesenjangan

pengelolaan sampah itu dari manajemen pengelolaan sampah yang kurang baik dan juga kesadaran sebagian masyarakat terlebih masyarakat kelas atas, dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang bermukim di Kota Makassar. Menurut Ibu Ki menyatakan bahwa :

“...kalau kita masyarakat sebenarnya tidak paham ya program apa yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi sampah di kota makassar ini karena ya kita tidak di kasih tahu jelas, kita cuman di kasih tahu nanti sampahnya di angkut jam begini, jadi kita langsung begitu saja tidak tahu sampah ini ternyata bisa bernilai ekonomi...”
(Wawancara Ki 8 Desember 2022)

Dilanjut dengan pernyataan Ibu R bahwa:

“...kita tidak di kasih tahu sampah itu harus dioleh biar bisa bernilai ekonomi, tidak ada sosialisasi juga soal sampah jadi kita masyarakat disini tidak bisa langsung saja, karena tidak ada himbauan apapun dari pemerintah, ...” (Wawancara R 8 Desember 2022)

Adapun menurut Ibu A mengungkapkan bahwa :

“...kalau seperti ini mungkin kita lihat dari berbagai situasi ya, dimana disini juga pemerintah tidak ada informasi apapun terkait bagaimana sampah itu bisa bernilai ekonomis, walaupun sampah mau di kelola juga kita tidak tahu caranya...” (Wawancara A 8 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat memang mengakui bahwa masih kurang mengerti terkait bagaimana pengelolaan sampah yang baik, karena masyarakat merasa pemerintah tidak membuat

sosialisasi terkait hal tersebut, yang mengakibatkan masyarakat tidak tahu apa-apa terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan sampah di Kota Makassar.

3. Solusi Mengatasi Kesenjangan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Dalam permasalahan sampah tentu dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasinya. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Seiring peningkatan populasi penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian kota besar masih menimbulkan permasalahan yang sulit untuk di kendalikan. Untuk itu sangat di perlukan solusi dalam mengatasinya.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait dengan ukuran kesenjangan dalam Pengelolaan sampah di Kota Makasaar, Seperti Berikut:

“...untuk solusinya, perkuat regulasi aturan-aturan persampahan yang terbaru, agar kiranya bisa menjadi pedoman DLH dalam pengelolaan sampah di kota makassar, setelah regulasinya kuat makanya bagaimana DLH memberikan edukasi kepada masyarakat. Paling tidak mengubah mindset masyarakat bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomis, karena sebagian masyarakat yang sudah merasakan adanya nilai ekonomis seperti bank-bank sampah itu bahkan menjemput sampah-sampah di rumah-rumah masyarakat secara langsung...” (Wawancara dengan M.NA 23 Agustutus 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa solusi yang baik untuk mengatasi

kesenjangan dalam pengelolaan sampah yaitu memperkuat regulasi aturan-aturan persampahan yang terbaru sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk DLH agar bisa lebih baik dalam penanganan sampah di Kota Makassar, dan mengubah mindset masyarakat terkait dengan sampah yang bisa bernilai ekonomis.

Senada dengan yang di kemukakan oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Seperti Berikut:

“...solusinya mungkin kedepannya yaitu bagaimana memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak SD bagaimana cara pemilahan sampah. Dan juga yang menjadi target DLH itu yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaann sampah berbasis masyarakat. Mustahil jika DLH yang mengurus semua, mindset masyarakat juga kebanyakan jika sudah melakukan pembayaran retribusi sampah artinya kewajibannya sudah selesai, retribusi ini hanya sebatas pengangkutan sampahnya saja bukan langsung melepaskan diri dalam pengelolaan sampah, sampah yang msih bernilai ekonomis itu yang masih mau di putar, sehingga sampah yang sampai ke TPA jaga minim. Diharapkan juga kedepannya terkait pengangkutan sampah organic dan non organic memang harus di jadwalkan, disediakan tempat tapi selama ini masyarakat mengatakan sudah melakukan pemilihan sampah namun pas pengangkutn disatuhkan kembali. Tetap akan dilakukan regulasi setelah keluarnya perda baru...” (Wawancara dengan TD 21 November 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan solusi yang tepat adalah memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak bagaimana cara yang benar dalam pemilahan sampah, sehingga itu bisa diterapkan dilingkungan nantinya, yang mana mampu menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam melakukan

pemilahan sampah yang bernilai ekonomis. Serta diharapkan adanya regulasi baru dari perda terkait dengan penanganan sampah di Kota Makassar.

Senada juga dengan yang di kemukakan oleh Staff TPA Tamangapa, Seperti Berikut:

“...solusinya mungkin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi harus dilakukan dimana kita harus menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu bukan suatu hal yang kotor, karena di tahun 2018 pemerintah pernah melakukan survie beberapa daerah yang rawan criminal, dengan adanya bank sampah itu masyarakat lebih aktif dalam pemilihan sampah, jadi bank-bank sampah ini yang mestinya perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam penanganan sampah. Namun jika kita melihat di masa covid 19 dalam pemilihan sampah itu mengalami penurunan dimana banyak peraturan-peraturan baru yang lahir di bank sampah di saat covid-19 salah satunya harus melakukan disinfektan, yang mengakibatkan susah menjual sampah yang ada...” (Wawancara dengan HZ 7 Desember 2022)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan solusinya yaitu mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam penanganan sampah, karena bagaimana pun masyarakatlah yang menghasilkan sampah. Mempertahankan dan mengembangkan bank-bank sampah yang ada karena bank sampah menjadi salah satu alternatif yang saat ini dirasa paling pas dalam penanganan sampah di Kota Makassar.

Seperti yang di ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah berpengaruh demi berhasilnya kelancaran pengolahan sampah dan berikut ini peran serta masyarakat sangat mendukung

program pengelolaan sampah suatu wilayah program (D. Y. Maolani & Ishak, 2018). Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Adapun Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya.

C. Pembahasan

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, holistik dan berkelanjutan termasuk pengurangan dan penanganan limbah, dimana tempat pengumpulan sementara adalah lokasi sebelum sampah diangkut untuk kemudian di daur ulang, diolah, dan menjadi sampah terpadu. (Akhmaddhian et al., 2020). Pengelolaan sampah sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting dalam mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, gaya hidup, dan kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. (Abbas, 2014). Dalam (Doran, 1981) Tahapan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebound*). digunakan Untuk

mengukur Kinerja Pelaksana Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah. Harapannya dengan menggunakan metode SMART pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat teratasi dan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Namun nyata dengan menggunakan tahapan Smart ini peneliti menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar masih mengalami kesenjangan baik dalam kebijakan yang ditetapkan tidak dilakukan dengan baik serta partisipasi masyarakat yang kurang serta mindset masyarakat terhadap penanganan sampah yang kurang.

- Pencapaian Target Dinas Lingkungan Hidup

(Sudrajat, 2002) mengemukakan bahwa salah satu program penanganan masalah persampahan adalah melalui program 3R dimana program tersebut merupakan program dengan menjalankan 3R yaitu reduce atau mengurangi jumlah sampah, recycle atau mendaur ulang sampah, dan reuse atau memanfaatkan kembali sampah. Pengelolaan sampah dalam program ini dimulai dari hulu ke hilir sehingga TPA bukan lagi tempat pembuangan tetapi tempat pemrosesan akhir sampah, Namun nyata target pengelolaan sampah dengan menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Makassar belum diterapkan dengan maksimal dalam artian berjalan namun tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar yaitu Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan target dimana 30% pengurangan dan 70% penanganan, namun belum terlaksana.

Dengan mempunyai target yang spesifik, konsentrasi pada hasil para karyawan dapat lebih tertuju dengan baik daripada pada perusahaan yang tidak mempunyai target yang spesifik. Penentuan kata untuk target dari manajer untuk para bawahannya dengan menggunakan kata-kata yang lebih spesifik dapat lebih meningkatkan kinerja para karyawannya untuk mencapai target tersebut. Dalam artian bahwa tahapan ini jika digunakan pada Pengelolaan sampah di Kota Makassar maka hal yang dilihat adalah bagaimana secara specific Pengelolaan Sampah di Kota Makassar dengan menggunakan metode 3R.

Target yang efektif dianggap mencakup metrik atau standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil tersebut, seperti hasil yang diinginkan. Manajer dan staf mengetahui dan melarung metrik dan norma ini. Ukuran-ukuran ini biasanya memiliki bentuk kualitatif dan kuantitatif. Jika dikaitkan dengan Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Makassar maka tentu kita bisa mengukur bahwa 3R yang telah ditetapkan itu membuat masyarakat masih cukup kesulitan karena masih sangat banyak masyarakat yang tidak memahami apa sebenarnya 3R dan pola pikir masyarakat yang masih acuh tak acuh terkait dengan sampah, yang pada akhirnya mengakibatkan target penanganan sampah tidak tercapai setiap tahunnya. (Mikkelsen 2001: 63) mengemukakan bahwa masyarakat akan berpartisipasi, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Target yang sudah ada sebelumnya harus mendapatkan kepercayaan dari

anggota staf yang mengerjakannya. Terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar, jelas bahwa tujuan pengelolaan sampah dengan metode 3R masih sangat perlu mendapat perhatian, baik dari sisi pemerintah maupun dari masyarakat. Karyawan harus berpartisipasi penuh dalam menetapkan tujuan untuk pekerjaan mereka sendiri dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi merencanakan tujuan kelompok kerja, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Karena praktik pengelolaan dan penanganan sampah Makassar harus terkoordinasi.

- Eksistensi yang terlaaksana dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar
Tujuan yang telah ditetapkan harus dapat diterima oleh staf (mungkin sulit, tetapi tidak boleh melebihi batas yang realistis). Kinerja karyawan biasanya akan menurun jika sasaran ini terlalu sulit (atau tidak terjangkau). Jika di kataitkan dengan kesenjangan implementasi pengelolaan sampah di Kota Makassar itu masih sangat jauh dari kesesuaian karena target dimana targetnya 30% pengurangan dan 70% penanganan. Dikarenakan masyarakat dikota makassar sering kali melihatn sampah sebagai masalah yang sepele, sehingga seringkali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Instruksi dari Kebijakan.

Target yang baik efektif adalah target yang yang harus mempunyai time-frame atau time limit. Hal ini jika di kaitkan dengan kesenjangan implementasi pengelolaan sampah di Kota Makassar tentu masih tidak sesuai dimana nyatanya pengangkutan sampah di kota mkassar masih kadang tidak tepat

waktu dalam pengangkutan sampah sehingga banyak masyarakat yang pada akhirnya juga berpendapat bahwa pengangkutan sampah tidak berjalan dengan baik, dan dibalik itu juga terkadang masyarakat juga tidak melihat jadwal pengangkutan sampah sehingga pada akhirnya sampah tidak diangkut dan mengakibatkan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah tersebut bertambah.

Implementasi kebijakan tentunya tidak selalu sesuai dengan harapan dan berhasil karena setiap kebijakan memiliki kemungkinan untuk mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa factor. Seperti yang terjadi pada Kota Makassar Untuk kesiapan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi Sampah Di masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar diketahui dalam hal pengangkutan sampah tetap berjalan seperti biasa di masing-masing kecamatan, dan juga di TPA tetap berjalan dalam penanganan sampahnya, yang menjadi kendalanya pengurangannya mungkin pada saat pandemi Covid-19 ini terjadi pengurangan anggaran yang otomatis akan membuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masyarakat mengalami kendala dan Sering kali juga terlihat Dinas Lingkungan Hidup telah membuat jadwal pengangkutan sampah namun pengangkutan sampah tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Serta dalam hal melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dimana terlihat sampai sekarang dilapangan belum adanya sanksi/pelanggaran yang diberikan kepada masyarakat jika membuang sampah sembarangan, Sehingga bisa dikatakan

bahwa Performance Goals yang ditetapkan oleh Pelaksana Pengelolaan Sampah yaitu 70% belum tercapai dengan maksimal, sehingga diharapkan Dinas Lingkungan Hidup harus lebih intens melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaksana di lapangan dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup untuk mengelola sampah dan memberikan motivasi seperti bonus dan lain sebagainya.

Untuk itu dapat dipastikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar masih mengalami ukuran kesenjangan yang sangat besar, yang tentunya masih jauh dari apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 dikatakan bahwa Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah terdiri atas : Sampah Rumah Tangga; Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Sampah Spesifik. Di ketahui bahwa Target pengurangan sampah di tahun 2020 adalah 88,494 ton/tahun. Atau 7.374,5 ton per bulan dan 245,8 ton per hari. Potensi timbulan sampah Kota Makassar tahun 2021 410.291 ton atau dalam sebulan mencapai 34.190 ton dan dalam sehari mencapai 1.139 ton. Target pengurangan sampah tahun 2021 adalah 98,470 ton per tahun. Atau 8.205 ton per bulan dan 273,5 ton per har. Potensi timbulan sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) tahun 2020 mencapai 402.246 ton per tahun. Target penanganan sampah tahun 2020 sebesar 75% per tahun atau 301.684 per tahun. Maka setiap bulan target penanganan sebesar 25.140,3 ton per bulan.

Tentu jika kita melihat dari reduksi data pengelolaan sampah yang ada di UPTD menunjukkan bahwa pada masa pandemic covid-19 hasil reduksi sampah mengalami penurunan yang signifikan, yang mengakibatkan timbunan-tumbulan sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat. Untuk itu Pihak DLH sekarang mengusahakan bagaimana cara mengaktifkan kembali cara pengelolaan sampah dimasyarakat melalui program *Long Wish*, melalui motivator yaitu bank sampah untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat dalam pengelolaan sampah pasca new normal.

(Fatmawati et al., 2019) mengklaim bahwa Bank Sampah Pusat adalah organisasi daerah yang membantu pembentukan dan administrasi Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar, yang selanjutnya menggandeng UPTD Bank Sampah Pusat dalam mengelola sampah dengan menerapkan sistem 3R dan memberikan nilai ekonomis pada limbah. Baik di tingkat RW/RT maupun di tingkat Kelurahan, masyarakat bertugas menjalankan unit Bank Sampah. Disebutkan pula, antara tahun 2015 hingga 2018, 14 kecamatan di Kota Makassar menyaksikan terbentuknya hampir 800 BSU. Namun, tidak semuanya berhasil sejauh ini; hanya sekitar 35%, atau sekitar 208 BSU, yang saat ini aktif.

Untuk itu jika melihat ukuran dari kesenjangan yang terjadi maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama entah itu

peran masyarakat bagaimana dalam memilah sampahnya dari sumber supaya ketika masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah itu, sampah-sampah yang bernilai ekonomis tidak sampai ke TPA.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masa pandemic covid-19 Kota Makassar maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Pelaksana dalam pengelolaan sampah dengan cara 3R sudah dilakukan namun belum maksimal dalam pengurangan sampah di Kota Makassar yang mana telah di jalankan sesuai dengan perwali 36 tahun 2018 dimana target tersebut sebanyak 30% pengurangan dan 70% penanganan, yang artinya bahwa target tersebut harus di capai sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal namun nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Diketahui dikarenakan kebanyakan kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup, salah satunya masih banyak masyarakat yang tidak memahami metode 3R tersebut.terlebih dimasa pandemi sendiri banyak bank-bank sampah yang tidak beroperasi, sarana dan prasarana kurang memadai seperti truk pengangkutan masih kurang. Kinerja pelaksana UPTD dalam pengelolaan sampah belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Kota Makassar. berdasarkan penelitian rata-rata produksi sampah/orang/hari adalah 0.7% Jika jumlah penduduk kota makassar 1.427.619 jiwa dikali dengan 0,7 kg/hari maka idealnya jumlah sampah

yang masuk adalah 999.333.300 Kg/Hari yang mana Jumlah tersebut tidak sesuai dengan capaian di UPTD bank sampah pusat. dengan asumsi setiap orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah per hari maka jumlah sampah yang dihasilkan perhari adalah 999.333.300 Kg atau 9.333 ton/hari dikalikan satu tahun (365 hari) maka 270.00.000 ton sampah/tahun. Jika dilihat dari nilai Ideal reduksi pengelolaan sampah sebanyak 30% maka total sampah pertahun sebanyak 81.000.000 ton sampah/tahun, namun nyatanya sampah yang di reduksi oleh UPTD Kota Makassar hanya 646.125,333 kg atau 73.500 ton/pertahun, yang mana ini masih sangat jauh dari target nilai ideal reduksi pengelolaan sampah. Kesenjangan pengelolaan sampah di Kota Makassar benar-benar belum bisa untuk diatasi dimana masih banyak sekali hal-hal yang bersimpangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan pola pikir masyarakat yang ada di Kota Makassar dalam hal penanganan sampah.

2. Penyebab Kesenjangan Terjadi karena a) Minimnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat terhadap program-program pengelolaan sampah yang dibuat pemerintah. b) Banyaknya pengusaha yang melakukan pengurangan sampah namun untuk mendapatkan datanya sulit yang membuat pihak dari Dinas Lingkungan Hidup kesulitan untuk mengetahui banyaknya sampah yang di kelola dan sampah yang masuk ke TPA. c) Pengelolaan sampah masih belum optimal. Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan, berkurangnya sarana dan prasarana

persampahan, serta berkurangnya daya dukung TPA, semuanya menunjukkan keprihatinan yang mendesak. d) Karena tidak ada sanksi bagi para pembuang sampah, warga Kota Makassar tidak memperhatikan masalah ini. e) Tanggung jawab kelembagaan untuk pengelolaan sampah belum berhasil. Masih kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan persampahan menggambarkan betapa beratnya persoalan ini. f) Undang-undang limbah padat lokal belum dipraktikkan dengan benar. Maraknya penerapan peraturan daerah pengelolaan sampah yang belum dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan penegakannya menunjukkan perlunya tanggapan yang mendesak.

3. Solusi dalam mengatasi Kesenjangan tersebut adalah a) memperkuat regulasi aturan-aturan persampahan yang terbaru sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk DLH agar bisa lebih baik dalam penanganan sampah di Kota Makassar, dan mengubah mindset masyarakat terkait dengan sampah yang bisa berniali ekonomis. b) memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak bagaimana cara yang benar dalam pemilahan sampah, sehingga itu bisa diterapkan dilingkungan nantinya, yang mana mampu menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah yang bernilai ekonomis. Serta diharapkan adanya regulasi baru dari perda terkait dengan penanganan sampah di Kota Makassar. c) mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam penanganan sampah, karena bagaimana pun masyarakatlah yang

menghasilkan sampah. Mempertahankan dan mengembangkan bank-bank sampah yang ada karena bank sampah menjadi salah satu alternatif yang saat ini dirasa paling pas dalam penanganan sampah di Kota Makassar.

B. Saran

Adapun saran penulis dari hasil penelitian tentang kesenjangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masa pandemic covid-19 Kota Makassar yaitu:

1. Bagi Pihak Dinas Lingkungan Hidup harus lebih memperkuat regulasi-regulasi aturan persampahan sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar bisa berjalan dengan maksimal tidak ada kesenjangan yang terjadi antara kebijakan yang di buat dengan apa yang terjadi di lapangan, seperti memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Menerapkan sosialisasi terkait Metode 3R kepada masyarakat.
2. Bagi Masyarakat dalam pengelolaan sampah itu harusnya bisa lebih melihat situasi bahwa kondisi sampah di Kota Makassar sudah sangat memerlukan perhatian yang khusus, untuk itu masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi dalam penanganan sampah di Kota Makassar, untuk membantuh pemerintah kota makassar bisa lebih baik lagi dalam

menangani persampahan di makassar, karena bagaimana pun peran masyarakat dalam penangan sampah menjadi hal yang sangat dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. A. and S. T. W. (2014). The Issues of Policy Implementation on Solid Waste Management in Malaysia. *International Journal of Conception on Management and Social Sciences*, 2(3), 12–17.
- Abdoellah, A. ., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmaddhian, S., Sunarsah, N., Sugiarto, & Dialog, B. . (2020). Regional Government Policy in EnvironmentalBased Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 140, 261–266.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahri, S., & Arda, M. (2019). Pengaruh Karakteristik Pengusaha Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Pada Kalangan Generasi Z. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 265–273. <http://journal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3621>
- Beland, D. (2017). Identity, Politics, and Public Policy. *Critical Policy Studies*, 11(1), 1–18.
- Bhakta, H. (2020). *Challenges, Opportunities, and Innovattion For Effective Solid Waste Management During and Post Ccovid-19 Pandemmic*. Resources, Conservation & Recycling.
- Brailsford, S. (2022). Closing the Implementation Gap; Comment on “Insights Gained From a Re-analysis of Five Improvement Cases in Healthcare Integrating System Dynamics Into Action Research.” *International Journal of Health Policy and Management*, x, 1–3. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.7593>
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyaningrum, & Halim, A. (2015). Kesenjangan Implementasi Dalam Penatausahaan Barang Millik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 1–14.
- Cheng, V. ., & Tong, J. . (2017). *Building Sustainability in East Asia : Policy, Design and People*. United Kingdom : John Wiley & Sons, Inc.
- Costa, C. (2018). *Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan*

Dalam Upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan (Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang).

- Daley, Michelle. E. (2019). FROM POLICY TO PRACTICE: A GAP ANALYSIS OF THE PROVISION OF COORDINATED STUDENT SERVICES IN MARYLAND. *ProQuest LLC*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Diki, L. O. (2022). *Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari*. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Doran, T. G. (1981). *There's S.M.A.R.T. Way To Write Management's Goals and Objectives*. Management Review.
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Effendy, I., Putri, I., Lubis, L., Kesehatan, F., Institut, M., & Helvetia, K. (2018). Manajemen Tata Kelola Sampah Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Medan). *Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life, 2620–6048*, 152–160.
- Fatmawati, A., Muhsin, M. A., & Taufik, A. (2019). *KINERJA PELAYANAN BANK SAMPAH KOTA MAKASSAR*. 1(18), 1–15.
- Fatoni, N., Imanuddin, R., & Darmawan, A. R. (2017). Pendayagunaan Sampah Menjadi Produk Kerajinan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.171.1505>
- Haryono. (2002). *Kinerja Pelayanan Persampahan di Kota Yogyakarta*. UNDIIP, Semarang.
- Hill, M., & Varone, F. (2021). *The Public Policy Process*. Routledge: New York.
- Idrus, S. (2019). *Kualitas Pelayanan dan Keputusan Pembelian*. Media Nusa Creative.
- Ilyas, S., Ranjan, R., & Kim, H. (2020). Science of The Total Environment Disinfection Technology and Strategies For Covid-19 Hospital and Bio-medical Waste Management. *Science of The Total Environment*, 141652.
- Jena, P. K. (2020). Impact of Pandemic Covid-19 on Education in India. *Internasional Journal of Current Research (IJCR)*, 12(7), 12582–12586.
- Kaza, S., Yao, L., Tata, P. ., & Woerden, F. . (2018). *What a Waste 2.0 A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington: International

Bank For Reconstruction and Development.

- Kustriani, S. H. . (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*.
- Latifah, I. ., Suryono, A., & Hadi, M. (2014). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 176.
- Laura Indrayani, N., & Lestanto, I. (2015). *Studi Pengaruh Temperatur Sintering Terhadap Sifat Mekanik Komposit Ldpe-Pet-Karet Ban Bekas*. 5(2011), 193–198.
- Mahmud, K., Hossain, M. ., Shams, S., & Amin, M. A. (2012). Comparative Analysis of Extended Aeration and Fenton Process in Landfill Leachate Treatment. *Inderscience Online : Internasional Journal of Environmental Engineering*, 4(3–4), 233–252.
- Maolani, D. Y., & Ishak, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 117–130. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3780>
- Maolani, Y., & Ishak, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 117–130.
- Maryam, Muryali, Yani, A., Fahmi, A., & Wulandari, R. (2021). Implementation of Waste Management Policy in Kota Juang District, Bireuen Regency. *International Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 19–29.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nagong, A. (2020). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2).
- Nasution. (2015). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, R. (2014). *NKebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, S. (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Akuntansi: Pengungkapan dan Audit*. msn.com
- Nzeadibe, Chidi, T., & Ejike-Alieji., A. U. (2020). Solid waste management

- during Covid-19 pandemic: policy gaps and prospects for inclusive waste governance in Nigeria. *Local Environment*, 7(20), 527–535. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1782357>
- Putra, Y. M. . (2020). *Corona Sudah Menyebar di 30 Kecamatan Karawang*.
- Rahardyan, B., & Widagdo, A. . (2015). *Peningkatan Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Ekonomi Lingkungan (Studi Kasus TPA Sampah Jatibarang Semarang)*. Program Pascasarjana UNDIP, Semarang.
- Rahman, Z. (2015). Polemik pengelolaan sampah, kesenjangan antara pengaturan dan implementasi. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1–8.
- Safrida, Maulida, D., & Safrida, N. (2022). *Implementation Gap : Realization of Coastal Community Empowerment Program in the Era of the Covid-19*. 18(148), 247–262. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i3.985>
- Sasmito, C. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. *Reformasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 81–87.
- Sekarsari, R., & Trianti, K. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10/2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kota Malang). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 15(1), 18–34.
- Silva, L. ., Nursalam, & Toda, H. (2021). Policy implementation of local governments in waste management in Dili City, Timor Leste. *Journal Of Governance and Accountability Studies (JGAS)*, 1(1), 1–13.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- Syafrudin. (2014). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu*. Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, Semarang.
- Taufik, & Isral. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 136.
- Trinh, L. T. ., Hu, A. ., & Phu, S. T. . (2021). Situation, Challenges, and Solutions of Policy Implementation on Municipal Waste Management in Vietnam Toward Sustainability. *Sustainability*, 13(3517), 1–16.
- Usman, S., & Can, L. . (2021). Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate). *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 1(2), 73–82.

- Wahab, A. . (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)* (dan I. B. Setiyono Wahyudi, Yuyul Setryorini (ed.); Keduabelas). Malang: Media Nusa Creative.
- Wildawati, D., & Hasnita, E. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Kawasan Bank Sampah Hanasty. *Jurnal Human Care*, 4(3), 149–158.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* (Edisi dan). Jakarta: PT. Buku Seru.
- Zulkifli, A. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.



LAMPIRAN



1. Permohonan Surat Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR PROGRAM PASCASARJANA

JL. SULTAN ALAUDDIN NO.259 TELP. 0411-866972 FAX. 0411-865588 MAKASSAR 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 910/PPs/C.3-II/VIII/1444/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 Muharram 1444 H,
2 Agustus 2022 M.

Kepada Yth.
Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPM
Di –
Makassar

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam aktivitas keseharian kita.

Dalam rangka penyusunan dan penelitian tesis mahasiswa :

Nama : **Sukmawati**
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
NIM : 105.06.11.036.20
Judul Tesis : Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Masa Pandemi Covid-19 Kota Makassar

Maka dimohon pada Bapak agar memberi kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian sesuai judul dan lokasi penelitian.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur,
Lh. Asisten Direktur I,

Dr. Syamsia, S.P., M.Si.
NBM. 1063 485

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Prodi Magister Administrasi Publik
3. Dosen Pembimbing mahasiswa ybs.
4. Mahasiswa ybs.

2. Surat Izin Penelitian (PTSP)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **6890/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
 Lampiran : - Walikota Makassar
 Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UNISMUH Makassar Nomor : 910/PPs/C.3-II/VIII/1444/2022 tanggal 02 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SUKMAWATI**
 Nomor Pokok : 105031103620
 Program Studi : Administrasi Publik
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Agustus s/d 04 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 04 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Direktur PPs UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

3. Surat Izin Penelitian (WaliKota)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email Kesbang@makassar.go.id Home page . <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 05 Agustus 2022

Kepada

Yth. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/1877-III/BKBP/VIII/2022

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6890/S.01/PTSP/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **SUKMAWATI**
NIM / Jurusan : 105031103620 / Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNISMUH
Tanggal pelaksanaan : 05 Agustus s/d 04 September 2022
Jenis Penelitian : Tesis
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar
Judul : "KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKRETARIS,



DR. HARTI S.I.P., S.H., M.H., M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Direktur PPs UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar



dlh@makassar@gmail.com dlh.makassar dlh.makassar DLH Kota Makassar Official

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
 Nomor : 660.4/5735 /DLH/IX/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Djabbar, ST., MT
 Nip : 19780715 200804 1 002
 Pangkat : Penata Tk. I
 Jabatan : Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUKMAWATI
 Nirm/ Jurusan : 105031103620 / Administrasi Publik
 Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : " KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA MAKASSAR"

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dari tanggal 05 Agustus 2022 s/d 04 September 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 September 2022

**Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3,
dan Peningkatan Kapasitas**



Taufiq Djabbar, ST., MT
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP. 19780715 200804 1 002

5. Wawancara (Instrumen Wawancara)

Nama Informan : Muh. Nurul Ma'arif Bin Amal, ST
 Umur : 27 Tahun
 Pendidikan : S1- Teknik Lingkungan
 Jabatan/Pekerjaan : Analis Lingkungan Hidup
 Waktu Wawancara : Selasa, 23 Agustus 2022/ Jam 09.10
 Tempat Wawancara: Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
1.	Kinerja Organisasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup (Performance Goals)			
		1. Bagaimana kinerja Organisasi dalam hal ini target terkait dengan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar apakah sudah diterapkan?	Target untuk pengelolaan sampah terkait dengan 3R dikota makassar itu sebenarnya sudah diterapkan namun memang masih belum maksimal dimana disini target pengurangan sampah itu ada dalam perwali 36 tahun 2018 kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, khusus untuk kota makassar itu targetnya 30% pengurangan dan 70% penanganan. Pengurangan sampah itu dilakukan di	

			<p>sumber dihasilkannya sampah, misalnya suatu kegiatan usaha contohnya hotel pengurangannya itu berupa tidak menggunakannya kembali botol minuman bekas dengan menggantikan air gallon merupakan salah satu bentuk pengurangan sampah.</p>	
		<p>2. Bagaimana target terkait dengan 3R apakah terukur dengan baik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar?</p>	<p>Saya rasa setiap tahun target pengelolaan 3R itu tidak tercapai karena itu tadi kendalanya juga kita kesulitan untuk mendapatkan datanya, masyarakat yang masih kurang mengerti apa itu 3R dan bagaimana mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hati, dan juga sebenarnya jika dilihat dari pemulung-pemulung yang ada di TPA itu membantu kami dalam hal pengurangan sampah karena dia memisahkan sampah-sampah yang bernilai ekonomis untuk di TPA untuk di ambil lalu dijual, namun sebenarnya dalam regulasi itu kan tidak boleh, kita juga sering mengingatkan kepada masyarakat untuk melarang namun tidak di lakukan karena itu sumber penghasilan mereka dari situ. Kalau terkait sapi itu kita sudah berapa kali mengatakan kepada masyarakat namun kita hanya mendapatkan jawaban kita lebih dulu disini, sehingga sangat berat untuk diatasi.</p>	

	-	3. Bagaimana keadaan pengelolaan sampah dalam hal ini target terkait dengan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah tercapai?	Jika kita kembali melihat bagaimana keadaan sampah di Kota makassar ini tentu kita pasti akan bisa langsung menilai bagaimana sebenarnya penanganan sampah di kota makassar, mengapa sampah-sampah tidak diolah dengan baik, tentu sudah bisa menjawab bahwa memang penerapan target pengelolaan sampah dengan 3R itu belum tercapai dengan maksimal di kota makassar, dimana masih banyak sekali hal-hal yang harus di perbaiki, baik itu dalam pola pikir masyarakat, maupun juga perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang notabennya juga menghasilkan sampah yang banyak, itu memang masih sangat memerlukan penanganan yang lebih tepat lagi.	
Eksistensi Pengelolaan Sampah				
		1. Bagaimana kesesuaian dalam hal ini target terkait dengan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah?	jika kita berbicara tentang kesesuaian pasti belum sesuai ya apa yang menjadi target kita dari Dinas Lingkungan Hidup dengan yang terjadi dilapangan, dimana ya itu tadi masih banyak sekali masyarakat yang masa bodoh perihal sampah, sehingga kita juga kesusahan untuk bagaimana mengeusaikan kebijakan ini dengan cara pandang masyarakat, kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam penanganan sampah, membuat target-target	

			baru namun memang ya berjalan seadanya saja sehingga memang kita dari pihak DLH juga kesusahan dalam hal ini, sering kali pun kita juga kesusahan dalam mendapatkan data dari penanganan sampah yang akhirnya juga berimbas lagi pada proses penanganan sampah itu sendiri	
		1. Bagaimana ketepatan waktu dalam hal ini pengangkutan sampah di Kota Makassar apakah sudah sesuai dengan yang diterapkan dalam kebijakan.	kalau terkait pengangkutan sampah itu kita usahakan untuk selalu melakukannya karena dengan begitu sampah-sampah akan diolah dengan baik, namun memang masih ada sebagian masyarakat yang selalu sadar diri bahwa sampah ini sudah mau di angkut yang mengakibatkan sampah-sampah tersebut tertumpuk lagi karena mereka membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga bisa di pastikan bahwa kesadaran masyarakat terkait sampah memang masih sangat kurang	
Ukuran Kesenjangan	1. Berapa besar ukuran kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar?	1. sebenarnya kita Dinas Lingkungan hidup disini hanya sebagai regulator, dalam artian pihak DLH hanya mengatur regulasi-regulasi pengelolaan sampah, adapun masalah pengangkutan dari sumber ke TPA itu telah dilimpahkan kepada kecamatan masing-masing, dikatakan dalam perwalinya nomor 3 tahun 2015 bahwa terkait pelimpahan kewenangan pengangkutan sampah		

			<p>dan retribusi, disini khusus DLH itu hanya menangani bagian pemrosesan akhir di TPA (Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup). Namun nyatanya memang masih sangat banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan penanganan sampah dengan baik sehingga pada akhirnya kesenjangan dalam pengelolaan sampah itu terjadi, terlebih lagi pada saat pandemi covid itu tadi banyak akhirnya bank-bank sampah yang tidak berjalan sehingga penanganan sampah pun tidak maksimal</p>	
3.	Penyebab Kesenjangan	1. Apa penyebab terjadinya kesenjangan?	<p>1. Saya rasa yang menjadi penyebab pengelolaan sampah mengalami kesenjangan ya itu tadi kita susah untuk mengubah mindset masyarakat, padahal disini masyarakat itu dia lebih ke pengurangan sampah, sedangkan dalam penanganan sampah itu dari pemerintah kota, jadi sangat penting peran masyarakat ini dalam pengelolaan sampah karena sebenarnya yang susah dalam pengelolaan sampah ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kota tetapi menjadi tanggung jawab bersama entah itu peran masyarakat bagaimana ia memilah sampahnya dari sumber supaya ketika masyarakat sudah melakukan</p>	

			pemilahan sampah itu, sampah-sampah yang bernilai ekonomis tidak sampai ke TPA	
4.	Solusi Mengatasi Kesenjangan	1. Dalam hal penanganan sampah tentu dibutuhkan sebuah Solusi. Seperti apa Solusi yang telah dilakukan oleh Pihak DHL dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ini Sehingga tidak mengalami kesenjangan?	1. Untuk solusinya, perkuat regulasi aturan-aturan persampahan yang terbaru, agar kiranya bisa menjadi pedoman DLH dalam pengelolaan sampah di kota makassar, setelah regulasinya kuat makanya bagaimana DLH memberikan edukasi kepada masyarakat. Paling tidak mengubah mindset masyarakat bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomis, karena sebagian masyarakat yang sudah merasakan adanya nilai ekonomis seperti bank-bank sampah itu bahkan menjemput sampah-sampah di rumah-rumah masyarakat secara langsung.	

Nama Informan : Taufiq Djabbar, ST., MT
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : S2
 Status : Masyarakat
 Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 14.11
 Tempat Wawancara: Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
1.	Kinerja Pelaksana (Performance Goals)			
		1. Bagaimana bapak melihat metode pengelolaan sampah dimakassar, apakah ibu merasa bahwa pengelolaan sampah sudah dioleh dengan	1. meskipun saya sering memulung di lahan TPA ini, tapi saya tidak tahu bagaimana target 3R yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam penanganan sampah di Kota Makassar, karena kita tidak tahu jadi kita hanya memulung disini tapi saya rasa targetnya belum tercapai karena kita lihat sampah disini sudah sangat banyak, dan susah untuk ditangani lagi.	

		baik dengan metode 3R?		
		1. Adakah arahan yang diberikan oleh Pemerintah setempat terkait dengan pengelolaan sampah, contohnya mungkin seperti sosialisasi, apakah Ibu pernah mengikuti sosialisasi?	1. kalau kita masyarakat hanya mengikuti arahan dari pemerintah namun sampai sekarang kita belum paham dengan baik arahan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, jadi kita tidak paham hal-hal apa yang harus di lakukan, kalau seperti sosialisasi saya rasa itu sangat jarang dilakukan oleh pemerintah bahkan saya belum pernah ikut sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa.	
		1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?	1. Kadang sikap pekerja yang mengangkut sampah suka marah-marah dan mengomel apabila terlalu banyak sampah dan cara mengangkut sampahnya asal angkut tidak peduli ada sebagian sampahnya yang jatuh berserakan. Mereka harusnya sadar kalau itu sudah menjadi tugas mereka mengangkut sampah kami	
2.	Penyebab Kesenjangan	2. Apa penyebab terjadinya kesenjangan?	1. Sebenarnya pengelolaan sampah itu tidak sulit jika memang kita semua paham terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang benar, namun memang masih masyarakat di Kota Makassar ini ya	

			begitu susah untuk menerapkan, terlebih lagi perusahaan dan pengusaha yang menghasilkan sampah kita biasanya kesulitan dapat datanya, sehingga tidak tahu sampah-sampah yang di kelola itu bagaiman	
3.	Solusi Mengatasi Kesenjangan	2. Dalam hal penanganan sampah tentu dibutuhkan sebuah Solusi. Seperti apa Solusi yang telah dilakukan oleh Pihak DHL dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ini Sehingga tidak mengalami kesenjangan?	2. Solusinya mungkin kedepannya yaitu bagaimana memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak SD bagaimana cara pemilahan sampah. Dan juga yang menjadi target DLH itu yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaann sampah berbasis masyarakat. Mustahil jika DLH yang mengurus semua, mindset masyarakat juga kebanyakan jika sudah melakukan pembayaran retribusi sampah artinya kewajibannya sudah selesai, retribusi ini hanya sebatas pengangkutan sampahnya saja bukan langsung melepaskan diri dalam pengelolaan sampah, sampah yang msih bernilai ekonomis itu yang masih mau di putar, sehingga sampah yang sampai ke TPA jaga minim. Diharapkan juga kedepannya terkait pengangkutan sampah organic dan non organic memang harus di jadwalkan, disediakan tempat tapi selama ini masyarakat mengatakan sudah melakukan pemilihan sampah namun pas pengangkutn disatuhkan kembali.	

			Tetap akan dilakukan regulasi setelah keluarnya perda baru.	
--	--	--	---	--

Nama Informan : Hafiz

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan/Pekerjaan : Staff TPA Tamangapa

Waktu Wawancara : Rabu, 7 Desember 2022/ Jam 14.38

Tempat Wawancara: TPA Tamangapa

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
1.	Kinerja Pelaksana (Performance Goals)			
		1. Bagaimana Bapak melihat dalam hal ini target terkait dengan 3R apakah sarana dan prasarana yang sebagai pendukung dalam pengelolaan sampah di Kota	1. saya rasa untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ini masih sangat kurang, apalagi banyak jumlah mobil yang rusak ditambah banyak kendaraan pengangkut sampah yang sudah tua dan sering rusak sehingga pelayanan pengangkutan sampah pun mengalami hambatan.	

		Makassar sudah memadai?		
		1. Bagaimana kesesuaian dalam hal ini target terkait dengan 3R dalam pengelolaan sampah yang mana diketahui bahwa penanganan sampah di Kota Makassar masih mengalami kesenjangan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penanganan sampah, apakah tidak ada sosialisasi yang dilakukan?	1. saya rasa sosialisasi pertahun 2020 itu stop karena bapeda menganggap bahwa tidak ada perubahan yang dirasakan, karena kecamatan yang melakukan sosialisasi yang di undang hanya itu-itunya saja , karena mereka menganggap bahwa kalau kita pergi jadi peserta ada uang-jalan, namun jika kita melihat keinginan pemerintah yang diundang untuk peserta sosialisasi adalah orang-orang yang mampu menyumbang lidahnya pemerintah ke masyarakat dalam hal memberitahukan masyarakat bagaimana cara mengelola sampah. Jadi dapat di katakan bahwa sosialisasi pengelolaan sampah di kota makassar tidak membawa pengaruh yang signifikan. Sekarang ini kita juga menganggarkan sosialisasi dengan cara door to door, dimana didalam suatu lorong wisata itu dilakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah.	
2.	Ukuran Kesenjangan	2. Berapa besar ukuran kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar?	1. sebenarnya untuk masalah kesenjangan pasti kita tahu bahwa ini akan terjadi karena untuk pengelolaan sampah pun kita juga harus melibatkan masyarakat tapi sejauh ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham dengan peraturan	

			<p>pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kita sudah melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan namun tetap susah, untuk kesenjangan sendiri yaitu tadi harus merubah mindset masyarakat kelas atas yang terkadang untuk memilah sampah dirumahnya itu agak susah apalagi di saat pandemi covid-19 kemarin itu banyak sekali masyarakat yang akhirnya tidak ikut serta dalam pengurangan sampah</p>	
3.	Penyebab Kesenjangan	3. Apa penyebab terjadinya kesenjangan?	<p>1. kalau menurut saya sebenarnya disini itu ya kita semua perlu kesadaran diri saja kenapa kesenjangan pengelolaan sampah itu terjadi, karena ya itu banyak faktor yang memang tidak berjalan dengan baik, baik itu dari manajemen pengelolaan sampah atau bahkan dari masyarakat itu sendiri, dimana saat susah untuk mengubah pola pikir masyarakat, karena tidak semua masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam penanganan sampah, seperti masyarakat kelas atas contohnya, dan saya rasa hal ini terjadi karena memang masyarakat tidak di berikan sanksi apapun kalau membuang sampah sembarangan jadi masyarakat ya semakin malas tahu dan tidak mau pusing perihal sampah</p>	

4.	Solusi Mengatasi Kesenjangan	3. Dalam hal penanganan sampah tentu dibutuhkan sebuah Solusi. Seperti apa Solusi yang telah dilakukan oleh Pihak TPA Tamangapa dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ini Sehingga tidak mengalami kesenjangan?	3. solusinya mungkin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi harus dilakukan dimana kita harus menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu bukan suatu hal yang kotor, karena di tahun 2018 pemerintah pernah melakukan survie beberapa daerah yang rawan criminal, dengan adanya bank sampah itu masyarakat lebih aktif dalam pemilihan sampah, jadi bank-bank sampah ini yang mestinya perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam penanganan sampah. Namun jika kita melihat di masa covid 19 dalam pemilihan sampah itu mengalami penurunan dimana banyak peraturan-peraturan baru yang lahir di bank sampah di saat covid-19 salah satunya harus melakukan disinfektan, yang mengakibatkan susah menjual sampah yang ada	
----	------------------------------	---	--	--

Nama Informan : Ibu Kiki

Umur : 35 Tahun

Status : Masyarakat

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 14.11

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
	<p>- Pencapaian Kinerja Pengelolaan dan Eksistensi Pengelolaan Sampah</p>	<p>1. Bagaimana Ibu melihat metode pengelolaan sampah dimakassar, apakah ibu merasa bahwa pengelolaan sampah sudah dioleh dengan baik dengan metode 3R?</p>	<p>1. meskipun saya sering memulung di lahan TPA ini, tapi saya tidak tahu bagaimana target 3R yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam penanganan sampah di Kota Makassar, karena kita tidak tahu jadi kita hanya memulung disini tapi saya rasa targetnya belum tercapai karena kita lihat sampah disini sudah sangat banyak, dan susah untuk ditangani lagi.</p>	
		<p>1. Adakah arahan yang diberikan oleh Pemerintah setempat terkait dengan pengelolaan sampah, contohnya mungkin seperti sosialisasi, apakah Ibu pernah mengikuti sosialisasi?</p>	<p>1. kalau kita masyarakat hanya mengikuti arahan dari pemerintah namun sampai sekarang kita belum paham dengan baik arahan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, jadi kita tidak paham hal-hal apa yang harus di lakukan, kalau seperti sosialisasi saya rasa itu sangat jarang dilakukan oleh pemerintah bahkan saya belum pernah ikut sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa.</p>	
		<p>1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?</p>	<p>1. Kadang sikap pekerja yang mengangkut sampah suka marah-marah dan mengomel apabila terlalu banyak sampah dan cara mengangkut sampahnya asal angkut tidak peduli ada sebagian sampahnya yang jatuh berserakan. Mereka harusnya sadar kalau</p>	

			itu sudah menjadi tugas mereka mengangkut sampah kami.	
--	--	--	--	--

Nama Informan : Ibu Mira

Umur : 30 Tahun

Status : Masyarakat

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 11.11

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
	Pencapaian Kinerja Pengelolaan dan Eksistensi Pengelolaan Sampah	1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?	1. Sikap pekerja dalam mengangkut sampah sudah baik dan sesuai tanggung jawab pekerjaannya, hanya saja waktu pengangkutan sampah disekitar lingkungan rumah kami sudah jarang beroperasi sehingga sampah kadang tinggal menumpuk	

Nama Informan : Ibu Karina In

Umur : 37 Tahun

Status : Masyarakat

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 12.11

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
	-Pencapaian Kinerja Pengelolaan dan Eksistensi Pengelolaan Sampah	1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?	1. Kadang sikap pekerja yang mengangkut sampah suka marah-marah dan mengomel apabila terlalu banyak sampah dan cara mengangkut sampahnya asal angkut tidak peduli ada sebagian sampahnya yang jatuh berserakan. Mereka harusnya sadar kalau itu sudah menjadi tugas mereka mengangkut sampah kami.	
	- Penyebab Terjadinya Kesenjangan	1. Apakah ibu tahu tentang program yang dibuat oleh pemerintah terkait cara penanganan sampah di kota makassar?	1. kalau kita masyarakat sebenarnya tidak paham ya program apa yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi sampah di kota makassar ini karena ya kita tidak di kasih tahu jelas, kita cuman di kasih tahu nanti sampahnya di angkut jam begini, jadi kita langsung begitu saja tidak tahu sampah ini ternyata bisa bernilai ekonomi.	

Nama Informan : Ibu Amalia

Umur : 31 Tahun

Status : Masyarakat

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 16.30

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
	Pencapaian Kinerja Pengelolaan dan Eksistensi Pengelolaan Sampah	1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?	1. Biasanya itu satu kali seminggu ada mobil pengangkut sampah yang datang untuk mengangkut sampah disekitar perumahan disini jadi menurut saya perilakunya kalau keadaannya seperti ini mereka mungkin yang malas untuk menjalankan tugasnya setiap hari	
	- Ukuran Kesenjangan	1. Apakah ada himbaungan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah yang ternyata bisa bernilai ekonomi?	1. kalau seperti ini mungkin kita lihat dari berbagai situasi ya, dimana disini juga pemerintah tidak ada informasi apapun terkait bagaimana sampah itu bisa bernilai ekonomis, walaupun sampah mau di kelola juga kita tidak tahu caranya	

Nama Informan : Ibu Ramlah

Umur : 30 Tahun

Status : Masyarakat

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 10.40

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
	- Pencapaian Kinerja Pengelolaan dan Eksistensi Pengelolaan Sampah -	1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?	1. Perilaku pekerja/tukang sampah kalau mengangkut sampah itu ada yang sering marah-marah apalagi kalau sampahnya banyak. Saya rasa mereka tidak sadar kalau itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pengangkut sampah	
	- Penyebab Terjadinya Kesenjangan	1. Apakah ada himbaungan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah yang ternyata bisa bernilai ekonomi?	1. kita tidak di kasih tahu sampah itu harus dioleh biar bisa bernilai ekonomi, tidak ada sosialisasi juga soal sampah jadi kita masyarakat disini tidak bisa langsung saja, karena tidak ada himbauan apapun dari pemerintah	

Nama Informan : Ibu Anggita Natimpa

Umur : 35 Tahun

Status : Masyarakat

Waktu Wawancara : Kamis, 8 Desember 2022/ 13.33

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
	- Pencapaian Kinerja Pengelolaan dan Eksistensi Pengelolaan Sampah	1. Bagaimana pengangkutan sampah yang dilakukan disini, apakah itu selalu tepat waktu ?	1. Ada sebagian pekerjanya itu yang mengangkut sampah pasti marah-marah kalau sampah terlalu banyak menumpuk padahal sampah itu juga menumpuk karena diangkut hanya tiga kali seminggu sementara tiap hari selalu ada sampah yang dihasilkan dan kadang sampah yang diangkut itu juga banyak yang jatuh dan biasa mereka biarkan berserakan saja	